

PENANGANAN BANJIR DI SURABAYA PADA MASA PEMERINTAHAN RADEN SOEKOTJO (1965-1974)

Mutiara Aprilia Bela Negara

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Email: Mutuara.18040284073@mhs.unesa.ac.id

Rojil Nugroho Bayu Aji

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Email: rojiil@unesa.ac.id

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, banjir yang menjadi peristiwa berkelanjutan turut selalu menjadi perhatian pemerintah dalam penanganannya dari tahun ke tahun, hal ini menjadi perhatian yang cukup serius mengingat apabila permasalahan ini tidak dapat teratasi menyebabkan munculnya wabah penyakit sehingga pergerakan ekonomi menjadi terhenti sebagaimana telah disinggung sejak masa kolonial dulu. Umumnya penanganan banjir tidak bisa disamakan pola penanganannya dari tahun ke tahun mengingat pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan zaman yang menjadikan efisiensi baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri dalam mengambil jalan keluar dari permasalahan yang ada, untuk itu maka dalam penelitian ini penulis memusatkannya pada masa pemerintahan Soekotjo yang mana berdasarkan penanganannya dibandingkan walikota pemerintah kota Surabaya lainnya, pada tahun yang dipilih oleh peneliti memiliki keistimewaan dan karakteristik sendiri dalam penanganannya di mana setiap penanganan pasti memiliki dampak positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Mengapa tahun Soekotjo 1965-1974 dapat dikatakan sebagai awal penataan kota Surabaya dalam upaya penanganan banjir dan; (2) Bagaimana upaya Walikota Surabaya Soekotjo dalam merealisasikan pembangunannya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penataan kota pertama kali berjalan pada masa Orde baru di Surabaya, di mana segala aspek nya mulai dirancang dengan tujuan pemulihan ekonomi yang menasar pada Sentralistik, Surabaya dijadikan tujuan utama pilar pemenuhan kebutuhan tersebut, maka langkah awal yang diambil yakni dengan cara pemenuhan fasilitas dalam segala aspeknya. Salah satunya yakni penanganan banjir pada tahun 1975, diawal rencana lima tahun kedua pemerintah pusat menanggapi hal tersebut dengan mendirikan Proyek Brantas Hilir, dalam realisasinya, adapun selain kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintahan kota juga banyak membuat kerjasama dalam penataan Surabaya, baik dengan masyarakat maupun Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya dalam perancangan proyeksi penangan banjir, pernyataan tersebut dilandasi dengan tentang bagaimana Surabaya bisa menyelaraskan diri dengan alam dimasa depan, mengingat Surabaya merupakan kota terpadat dengan peningkatan urbanisasi yang lumayan tinggi setiap tahunnya dengan notabene kota industri dan pusat pembelanjaan di mana lebih dominan dengan kerusakan alam. Adapun terkait dengan upaya realiasi yang dilakukan pada masa tersebut yakni dengan cara : (1) Membuat proyek brantas hilir, (2) Mormalisasi genangan lewat pelebaran jalan, Merancang proyek WR Soepratman sebagai upaya penyaluran sanitasi dan Kawasan lingkungan yang sehat, dan yang terakhir (4) Pengerukan dan pelebaran kali. Adapun dalam proyek tersebut selain membuat kebijakan adanya caampur tangan antar kerjasama yang ditanam dari awal antara masyarakat dan perguruan tinggi inilah yang menjadikan pembangunan Surabaya terutama dalam penanganan banjir dapat diwujudkan dengan baik hingga sekarang, hal tersebut disebabkan pemegang kendali tongkat estafet dari masa ke masa dipahami betul perkembangan setiap aspeknya yang mana tidak dimiliki di kota manapun. tujuan pemeliharaan budaya dan pengaruh social yang dibentuk menjadikan pembentukan kota dapat diharapkan lebih stabil, adapun upaya tersebut menciptakan sejumlah aksi yang mana lewat kampung pemerintah lebih dengan mudah gotong royong melibatkan masyarakat dalam penataan lingkungan yang baik dari memperbaiki kualitas lingkungan melalui kearifan daerahnya sendiri. Meskipun membutuhkan kesadaran masyarakat dalam waktu yang lama sistem penanganan dan pengelolaan yang cukup baik inilah yang menyebabkan Surabaya menjadi kota yang dapat dikatakan sukses dalam penanganan banjir dibandingkan kota-kota terpadat lainnya seperti Jakarta dan Semarang.

Kata kunci : Penanganan, Banjir, Soekotjo

Abstract

Along with the times, flooding which has become a continuous event has always been a concern of the government in handling it from year to year, this is a serious concern considering that if this problem cannot be resolved it will cause disease outbreaks so that economic movement will stop, as has been mentioned since the colonial period.

before. In general, flood management cannot be compared with the pattern of handling from year to year considering the increase in population and the development of the times which makes efficiency both from the government and the community itself in taking a way out of existing problems, for that reason in this study the author focuses on the reign of Soekotjo who which is based on its handling compared to other mayors of the Surabaya city government, in the year chosen by the researcher it has its own privileges and characteristics in its handling where each treatment must have positive and negative impacts in various aspects of life.

Based on the above background, the formulation of the research problem is (1) Why the Soekotjo years 1965-1974 can be said to be the beginning of structuring the city of Surabaya in an effort to deal with floods and; (2) What are the efforts of the Mayor of Surabaya Soekotjo in realizing the construction? This study uses historical research methods which include heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of this study explain that urban planning was first carried out during the New Order era in Surabaya, where all its aspects began to be designed with the aim of economic recovery targeting Centralistic, Surabaya was used as the main goal of the pillar of meeting these needs, so the first step taken was by completeness. facilities in all aspects. One of them is the handling of floods in 1975, at the beginning of the second five years the central government handled this with the planning of the Lower Brantas Project, in its realization, in addition to cooperation with the central government, the city also made many collaborations in structuring Surabaya, both with the community and State Universities. in Surabaya in the flood management projections, the statement is based on how Surabaya can adapt to the future nature, considering that Surabaya is the most populous city with a fairly high increase in urbanization every year with industrial cities and shopping centers which are more dominant with natural damage. As for the realization efforts carried out during that period, namely by: (1) Creating a downstream Brantas project, (2) Normalization through road widening, Designing the WR Soepratman project as an effort to improve sanitation and environmental health, and lastly (4) Dredging and times widening. As for the project, in addition to making a policy of inter-collaboration that was planted from the start between the community and universities, this is what makes the development of Surabaya, especially in flood management, can be realized well until now, this is due to the control of the baton from future to future developments. every aspect of it which is not available in any city. the purpose of maintaining culture and social influence that is formed is to make the formation of cities more stable, while these efforts create a number of actions through which the government's villages can more easily involve the community in good environmental management than improve environmental quality through their own local wisdom. Although it requires public awareness for a long time, a fairly good handling and management system is what causes Surabaya to become a city that can be said to be successful in dealing with floods compared to other densely populated cities such as Jakarta and Semarang.

Keywords: Handling, Flood, Soekotjo

I. PENDAHULUAN

Pada awal abad kedua puluh Surabaya masih merupakan tempat yang paling tidak sehat, bahkan jika dikatakan Jakarta lebih buruk. Survei periode 1903 menghasilkan angka kematian 36 per seribu untuk Surabaya dibandingkan dengan 57 untuk Jakarta. Di kedua kota penyebab utama kematian dan kesakitan adalah sama yaitu malaria dan penyakit usus. Seperti yang selalu menjadi ciri khas kehidupan di daerah tropis, semua orang menderita penyakit. Beberapa sembuh, yang lain meninggal.

Surabaya dibangun hanya beberapa meter di atas permukaan laut, drainase alami yang lambat tergantung pada pasang surut. Situasi menjadi jauh lebih buruk setelah 1830-an dimana benteng-benteng yang mulai tidak terawat ini kemudian dikelilingi oleh parit-parit yang mana kemudian menjadi tersumbat oleh sampah dan kotoran. Setelah benteng-benteng ditinggalkan pada tahun 1880, parit-parit itu secara bertahap diisi tetapi bagian-bagiannya tetap stagnan. Perairan sepanjang garis pantai selat Madura terbentang rawa-rawa dan kolam (tambak) yang digunakan untuk pengembangbiakan ikan dan pembuatan garam menjadikan tanah telah menyatu.

Di sekitar pulau yang semula saat musim kemarau berlangsung, genangan air akan berkontraksi menjadi payau, kolam tergenang, tempat tersebut kemudian menjadi kembang biak nyamuk anopheles, kampung-kampung di bagian kota yang lebih rendah juga rentan terhadap banjir di monsun barat, kadang-kadang selama berminggu-minggu. Oleh karena itu kejadian malaria memuncak pada pertengahan tahun. Wabah terburuk terjadi di akhir periode kolonial pada tahun 1907 tetapi, meskipun pengetahuan penyakit meningkat pesat, itu tetap menjadi masalah serius sampai akhir 1920.¹

Banjir bukanlah peristiwa unik yang mana setiap tahun tidak pernah kita saksikan, banjir sudah melewati sejumlah periodisasi yang sangat panjang bahkan pada saat pemerintahan Belanda pernah menjadi topik utama permasalahan di Indonesia, sebagaimana menurut J. Stroomberg, menyebutkan melebihi negara-negara tropis lainnya, wilayah ini tidak hanya periode kemarau tahunan, namun juga fluktuasi curah hujan yang besar (terutama selama angin musim basah).² Lantas apa saja yang menjadi faktor utama penyebab munculnya banjir.

Permasalahan banjir yang terjadi di sejumlah perkotaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara teori, ada lima penyebab dan jenis banjir perkotaan, yaitu, 1) kurangnya infrastruktur drainase, 2) tersumbatnya sistem drainase, 3) banjir di daerah dataran

rendah, 4) cadangan karena elevasi muka air di hilir, dan 5) genangan yang disebabkan oleh tingginya muka air sungai.³

Hal yang menarik perhatian peneliti yaitu adanya banyak variatif penanganan Belanda dalam mengatasi banjir antar-wilayah, umumnya hal tersebut disebabkan karena pengaruh lingkungan di sekitarnya, baik pengaruh dataran tinggi-rendahnya suatu tanah, tingkat surut dan juga kemiringan tanah, sebagaimana dengan fokus utama peneliti yakni membahas pada daerah Surabaya, maka berdasarkan struktur tanahnya, sebagaimana yang kita tahu Surabaya memiliki rendah-dataran dan hilir dari beberapa sungai (Kali Mas dan Pegirian Sungai).

Tanah Surabaya strukturnya terdiri dari 80 persen dataran rendah, dengan ketinggian 3-6 meter, yang berlaku kemiringan rendah-dataran tanah adalah sekitar 0-2 persen dan daerah ini terletak di bagian selatan, utara, dan bagian timur kota. Surabaya memiliki dataran bergulir dengan ketinggian 5 meter di atas tingkat surut dan kemiringan adalah 5-20 persen, yang daerah ini biasanya terletak di bagian barat kota. Sedangkan bagian utara dan timur merupakan daerah yang tergenang air, dimana datarannya datar membuat air perlahan-lahan mengalir ke laut.⁴

Maka dari itu dengan bentuk topografi yang menunjukkan pola aliran sungai yakni palarel, ⁵dimana aliran sungai yang hampir sejajar dengan sungai induk, tidak menjadikan Surabaya menjadi daerah yang rawan diberitakan sebagai pusat banjir, hal lain yang menjadi alasan mengambil daerah Surabaya dikarenakan dibanding dengan kota besar yakni Jakarta dan Semarang, penurunan muka tanah pada tahun 2021⁶, dan penanganan banjir di kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik dibandingkan yang lainnya yang notabene merupakan sama-sama kota industri dan kota terpadat. Dimana menurut peneliti kultur budaya yang dibangun oleh masyarakat sejak dulu inilah yang dapat berhubungan dan berpengaruh ke zaman sekarang.

Terkait dengan kebijakan walikota dalam penanganan banjir pada masa pemerintahan kota Surabaya, pada waktu itu membuat penyaluran air hujan dalam wilayah kota sendiri, yakni sungai Kalimas, dimana di kota Surabaya terbagi menjadi 2 saluran air, saluran air yang pertama yaitu saluran air yang dibangun dan disalurkan dari Mojokerto dan porong kemudian disalurkan lewat Jagir dan dibuang ke laut secara langsung. Yang kedua yakni aliran sungai yang dilalui dari sejumlah titik jalur kali/ sungai per wilayah di kota Surabaya dimana kemudian dipusatkan pada sungai Kalimas. Maka tak heran mengapa di beberapa tempat

¹ Howard Dick, *Surabaya city of work a socioeconomic history, 1960-2000* (Ohio: University Press, 2002), hlm. 167.

² Stroomberg, *Hindia Belanda 1930* (Yogyakarta: IRCISoD, 2018), hlm. 226.

³ Parkinson, *Pengelolaan Air Badai Perkotaan di Negara Berkembang* (London: Penerbitan IWA, 2005), hlm. 1.

⁴ C. Susetyo, *Perkotaan Manajemen Banjir di Surabaya Kota: Mengantisipasi Perubahan tersebut Sistem Sungai Brantas* (Belanda: Enschede, 2008), hlm. 2.

⁵ R. Verra, *Analisa perubahan pola aliran sungai dan daerah genangan di pantai Surabaya – Sidoarjo menggunakan citra satelit penginderaan jauh* (Surabaya: Tesis ITS, 2014), hlm. 23.

⁶ K.H Rahajeng, *Bukan Jakarta Penurunan Tanah Pekaloongan Lebih Meresahkan*, website CNBC Indonesia, diakses 07 Oktober 2021 pukul 13.25 WIB.

kalimas terdapat jembatan yang cukup lebar dari ukuran yang diperlukan.⁷

Tidak hanya berhenti di situ penanganan-penanganan lainnya pun turut dilakukan pada masa Soekotjo baik dari penggunaan pompa-pompa air untuk daerah Darmo, pengerukan afvoer⁸ daerah Bulak banteng yang dilakukan diluar pintu air, dan pelebaran saluran propil Gunung sari ke Simo sepanjang +- 6 km.⁹

Hal tersebut dilakukan mengingat akibat pengaruh Perang Dunia ke-2 yang telah menyebabkan rusaknya pemukiman dan perumahan di kota Surabaya. Dimana pada masa itu juga terjadi pembongkaran keseluruhan dari nol dalam penataan segala aspeknya. Selain itu juga dengan didukungnya program pada masa orde baru yakni program perbaikan kampung, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Presiden dimana disusun suatu rencana pembangunan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968 yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun atau *Repelita*. Program *Repelita* merupakan lampiran dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mana berdasarkan fokus penelitian yakni pada periodisasi waktu masa jabatan Walikota Surabaya Raden Soekotjo (1965-1974), maka *pelita* tersebut masuk ke dalam tahapan ke-1 dan ke-2.¹⁰

Program tersebut tidak hanya dipusatkan pada perbaikan infrastruktur yang berhubungan hanya pemerintah saja namun masyarakat turut memegang peran penting dimana Soekotjo banyak membuat kebijakan baik pelarangan dalam membuang sampah disekitar saluran, maupun pengadaan kerjabakti yang diintegrasikan sesuai kecamatan yang dilewati saluran air penyebab banjir.¹¹

Upaya tersebut dilakukan sebagai tujuan pensuksesan Program Perbaikan Kampung (KIP) yang mana mulai diimplementasikan di Jakarta dan Surabaya, dan juga proyek WR. Supratman, KIP merupakan program pertama yang berhasil diakui secara global, dan bisa dibilang merupakan program perbaikan terbesar yang memimpin di beberapa negara untuk lebih dari tiga dekade.¹²

Mengingat kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap pengendalian banjir yang dihubungkan dengan budaya masyarakat sekitar pada dasarnya masyarakat Surabaya umumnya sangat minim dalam pengedukasian diri terhadap sadar bencana hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang

mendirikan lahan baik di sekitaran bantaran sungai, pembobolan tangkis, maupun pembuangan sampah secara sembarangan di aliran sungai.¹³ Pemaknaan dalam upaya penanganan dan penyikapannya bencana memiliki sejumlah pandangan dari beberapa ahli,

Menurut Clyde Kluckhohn dalam Rohani, telah terbagi cara pandang manusia terhadap alam dalam tiga orientasi nilai. Pertama, manusia tunduk kepada alam sehingga hanya bisa pasrah (manusia tradisional). Kedua, manusia berusaha mencari keselarasan dengan alam (transformasi). Ketiga, manusia berhasrat menguasai alam (manusia modern).¹⁴

Hal tersebut kemudian dijelaskan secara spesifik oleh Koenjaningrat dalam Rohani dimana disesuaikan dengan kultur masyarakat di Indonesia sendiri, ia beranggapan bahwa umumnya masyarakat akan memilih untuk berusaha hidup selaras dengan alam, namun jika berhadapan dengan kekuatan alam yang membawa maut seperti bencana, mereka cenderung menyerah secara total kepada nasib, bagi mereka bencana alam merupakan sesuatu yang harus diterima apa adanya.¹⁵

Bencana telah menjadi fenomena sosial dimana seperti yang dikemukakan oleh E.L Quarantelli oleh Rustiati dalam implikasi positif terkait tindakan preventif dan mitigasi disebutkan bahwa prioritas perhatian, cara berpikir, dan bersikap proaktif ketimbang reaktif inilah yang menjadikan bencana sebagai suatu fenomena sosial yang mana alih-alih lebih memilih berpikir setelah menunggu bencana terjadi dibandingkan bagaimana kalau bencana terjadi.¹⁶

Untuk itu diperlukan kapasitas daya bangkit sikap *resiliensi* sebagaimana menurut Jimba, Otsuka, dkk. Yang menjelaskan bahwa individu tidak mampu mencegah semua ancaman yang dihasilkan dari keadaan darurat atau bencana, akan tetapi individu bisa membangun resiliensi dalam diri untuk mengatasi kesulitan yang dialami jika suatu saat keadaan darurat atau bencana terjadi.¹⁷

Teori resiliensi dapat dijadikan alat Analisa untuk menjelaskan bagaimana masyarakat memposisikan diri sebagai transformasi (keselarasan dengan alam) dalam penanganan banjir, dengan dilatar belakangi dengan mengambil peristiwa pada masa Soekotjo, pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kesulitan suatu bencana banjir dapat menjadi salah satu cara yang efektif, dimana kemudian dimuat pada garis mikroskop sosial yakni memusat

⁷ Arsip Kota Surabaya No.j.24/163, tahun 1966, masalah banjir (drainage) dalam kotapradja Surabaya.

⁸ Arsip Kota Surabaya No.T.K.147/IIIa2/250, tahun 1966, pengerukan afvoer "Bulak banteng".

Afvoer adalah pengendali banjir berfungsi sebagai saluran / selokan

⁹ Arsip Kota Surabaya No.7804/939, Tahun 1965, idzin persewaan tanah- tanah dipinggir sungai (stren).

¹⁰ Sarip Hidayat, *Guide Arsip Presiden RI: Soeharto 1967-1998* (Jakarta: Arsip Statis III Direktorat Pengolahan, 2018), hlm. 13.

¹¹ Arsip Kota Surabaya No.7804/939, Tahun 1966, mengatasi daerah banjir darmo.

¹² Anita Dianingrum, *Perkembangan Program Perbaikan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat di Surabaya* (Surabaya:Tesis ITS, 2017), hlm. 2.

¹³ Arsip Kota Surabaya No.7804/939, tahun 1966, cara memperbaiki saluran gunungsari untuk mengurangi banjir dalam kota Surabaya.

¹⁴ Rohani Putri, *Masyarakat Sadar Bencana : Pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang* (Jakarta : jurnal masalah-masalah sosial, 2018), hlm. 225.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁶ Ita Rustiati, *Menyikapi Bencana Sebagai Fenomena Sosial di Banten* (Banten: jurnal UPI), hlm. 3.

¹⁷ Rahma Tri, *Hubungan Antara Kebersyukuran Dan Resiliensi Pada Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana di Yogyakarta* (Yogyakarta: Skripsi UII, 2018), hlm. 5.

kepada masyarakat secara khusus dan umum, yang dihubungkan dengan kebijakan yang dibuat.

Dengan demikian asumsi yang dapat saya simpulkan terkait penanganan banjir di Surabaya Pada umumnya masalah perkotaan seperti kota Surabaya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut; Permasalahan drainase karena ulah manusia, yaitu: Perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai (DAS); Pembuangan sampah ke saluran-saluran air, kawasan di sepanjang sungai atau saluran drainase; Infrastruktur drainase kurang berfungsi (bangunan air). Permasalahan drainase karena alam, yaitu: Erosi dan sedimentasi; Curah hujan; Kondisi fisiografi/geofisik sungai; dan kapasitas sungai atau saluran-saluran air yang kurang memenuhi.

Alasan yang mendasari mengapa memilih taun masa Raden Soekotjo dibandingkan walikota yang lain dikarenakan, awal mula pilar utama pembentukan segala aspek kota diatur dan terjadi pada masa Raden Soekotjo yakni dengan program KIP WR Supratman, dengan perancangan awal yang diharapkan sebagai pembentukan pondasi baru bagi wajah Surabaya, maka sebagai langkah awalnya yang dilakukan yani dengan cara merancang penataan kota terlebih dahulu dengan dipusatkan oleh warga, proyeksi penataan kampung yang difasilitasi inilah diharapkan agar pemerintah tidak bisa secara sembarangan dalam membuat kebijakan yang dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat Surabaya, karena dari awal sudah dibentuk dan diperkuat dengan pembentukan kampung.

Akibatnya apabila pemerintah bersikap seenaknya maka pemerintah yang akan kalah karena harus menghadapi warga secara langsung dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya walikota yang diturunkan dikarenakan Surabaya tidak dapat tertata dengan baik, pembentukan budaya yang kuat lewat penataan kampung inilah yang menjadi alasan kuat mengapa perubahan-perubahan yang dilakukan walikota hingga masa sekarang dapat dikatakan Surabaya tak akan berubah wajah¹⁸, kebijakan ini lah yang menjadikan keistimewaannya dibandingkan walikota yang lain dan tidak dapat dimiliki oleh daerah lainnya dikarenakan berhubungan dengan teori resiliansi yakni adanya kapasitas daya bangkit sehingga secara tidak langsung warga disipkan sebagai upaya pencegahan (miskroskop social) apabila ada kebijakan dari walikota yang berujung pada penyelewengan dan merugikan, maka sebelum terjadinya bencana tersebut, warga berhak dalam mengambil suara, adapun keistimewaan yang lain terkait kebijakan yang dijalankan oleh Raden Soekotjo yang berhubungan dengan penanganan banjir, sebagaimana yang disebutkan dalam arsip Surabaya dan buku howard dick dengan mendirikan proyek brantas hilir yang terjadi pada tahun 1975, dengan skema besar yang melibatkan pengerukan sepuluh kilometer sungai kalimas dari sungai brantas di wonokromo sampai

muarannya di selat madura, dan dengan segala aspek tindakannya yang telah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak hingga perguruan tinggi dalam perencanaan, pada masa Soekotjo dapat dikatakan permasalahan yang terjadi dapat diatasi dan telah menjadi rencana jangka pendek dan jangka Panjang,¹⁹ yang nantinya akan berguna dalam penanganan banjir dan dibuktikan lambat laun hingga masa sekarang, adapun terkait insfrastruktur dibangun pada masa tersebut masih diteruskan hingga masa sekarang dan menjadi upaya pencegahan utama masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian terkait rencana jangka Panjang tersebut , pelaksanaan program yang berlanjut menghasilkan sejumlah bukti dengan banyaknya penghargaan yang telah diraih bagi Surabaya secara berkelanjutan; seperti *The Aga Khan Award for Architecture*, 1986; *UNEP Award*, 1990; dan *The Habitat Award*. Dan pada pelaksanaannya, keberhasilan program dapat tercapai dengan adanya peran serta dari masyarakat.²⁰

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan sejarah, metode yang digunakan dalam suatu penulisan terdiri dari empat tahapan metode, yaitu; Heuristik, Kritik, Sumber, Interpretasi, dan Historiografi.²¹ Penelitian ini berkaitan dengan pengkajian tentang peranan alam terhadap jalannya sejarah (banjir). Maka, selain menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (sejarah, geografi, ekonomi, politik, sosiologi) dapat juga menggunakan pendekatan teknik dalam tata kelola dan hukum untuk mengkaji fenomena banjir dan pengendaliannya pada masa Walikota Soekotjo, untuk dapat mengkaji berdasarkan pendekatan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Tahapan pertama adalah Heuristik (pengumpulan sumber), Peneliti mengumpulkan sumber, dengan melalui tahapan yaitu; langkah pertama, mencari sumber-sumber sekunder seperti Arsip yang berasal dari dinas perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya yaitu arsip penanganan banjir Surabaya tahun 1966 yang berisi laporan dari Kecamatan, Walikota dan Pihak aparat keamanan terkait kebijakan upaya penanganan banjir yang dilakukan, baik dengan melibatkan secara langsung dengan warga maupun membuat rancangan pembangunan pengendalian banjir dalam rancangan jangka Panjang maupun jangka pendek, adapula sumber terpercaya seperti majalah *Liberty* yang didapat dari Perpustakaan Medayu Agung, majalah analisis CSIS yang bisa didapatkan di www.internetarchive.com. Serta buku-buku terbitan Kotamadya Surabaya, kemudian sumber lainnya adalah buku *Surabaya city of work*, buku *petunjuk kota besar Surabaya*, dan buku-buku terbitan yang lainnya yang

¹⁸ SWATV Smekdors, Siapapun Walikotanya, Surabaya Tak Akan Berubah Wajah. https://youtu.be/WjLj72TG_W0. Diakses tanggal 6 desember 2020.

¹⁹ Arsip Kota Surabaya No.617, tahun 1966, Surat Walikota Kepala

Daerah dalam masalah banjir.

²⁰ Anita Dianingrum, *op. cit.*, hlm. 3.

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya), hlm. 89.

memberikan penjelasan mengenai laporan tentang kondisi kesehatan, keadaan pemukiman, pertumbuhan penduduk dan kondisi geografi Surabaya, adapun kondisi geografis tersebut dapat diperkuat dengan gambar peta kota Surabaya yang didapat di www.kitlv.com seputar peta tahun 1867 dan tahun 1924.

Dimana dari gambar peta tersebut bisa ditarik kesimpulan peranan arah datangnya banjir dapat disebabkan banyak hal baik pemukiman penduduk, peranan pemerintah pada tahun tersebut dan factor pengaruh ekonomi penyebab kepadatan pemukiman tersebut, factor-faktor tersebut kemudian diperkuat dari bukti jurnal-jurnal salah satu contohnya seperti *masyarakat sadar bencana: pembelajaran karo, banjarnegara dan jepang* yang mana isinnya berguna sebagai teori/konsep dalam menganalisis masalah penanganan banjir yang terjadi.

Selain itu sumber lainnya yakni tesis maupun skripsi baik dari UNAIR, ITS, dan UNESA yang mengandung data yang berguna bagi peneliti, dan yang terakhir sumber yang didapat dari hasil wawancara yang sesuai dengan topik pembahasan, seperti *Siapa pun walikotannya Surabaya tak akan pernah berubah wajah* yang didapat di SWATVSmekdors yang berisi pembahasan Surabaya yang pada dasarnya memang merancang kota dengan memperhatikan segala aspeknya dalam penataan kota salah satunya yakni banjir.

Tahapan selanjutnya adalah Kritik sumber yang berarti menilai, menguji dan menyeleksi dengan tujuan untuk mendapatkan sumber yang asli²², kritik disini mengalami 2 fase yaitu kritik intern dan kritik ekstern, dengan data-data yang diperoleh hanya beberapa data yang dapat dijadikan sebagai sumber penulisan sejarah. Adapun isi dalam kritik ekstern mengarah pada pengamatan ejaan penulisan dalam arsip berdasarkan batas temporal yang disajikan, sedangkan untuk kritik intern mengarah kedalam kandungan isi dan sumber.

Tahapan berikutnya yaitu Interpretasi, interpretasi ini diperoleh dengan menghubungkan fakta-fakta tentang UU pemerintah mengenai *REPELITA* sejak zaman Orde Baru hingga masa Walikota Soekotjo tersebut berakhir, dan mengaitkan dengan berbagai kondisi dan hambatan yang ada pada masa tersebut, fakta-fakta tersebut juga dihubungkan dengan tujuan untuk memperoleh hasil.

Untuk tahapan terakhir yaitu Historiografi, pada tahap ini penulisan sejarah dilakukan rangkaian cerita dari hasil interpretasi pada tahapan sebelumnya, dirangkai dan disusun menjadi cerita yang utuh sehingga menghasilkan cerita/kisah sejarah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

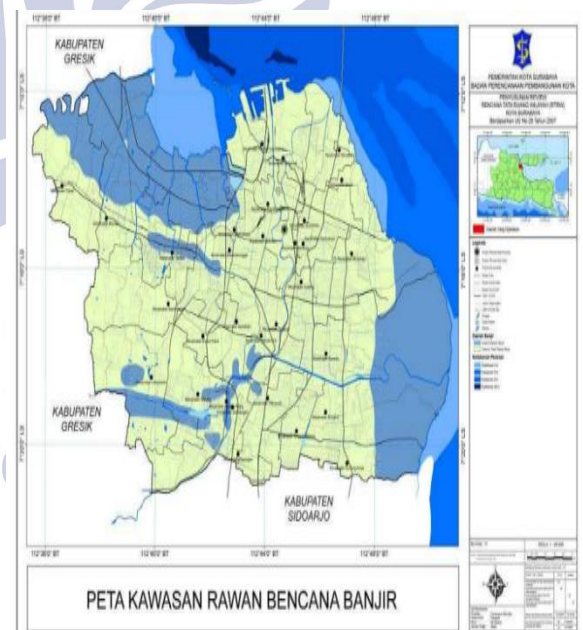
Kedaaan Kota Surabaya

Berdasarkan tingkat kesuburan tanah dan topografi Surabaya yang dapat dikatakan memiliki wilayah yang rendah menjadikan kota ini gampang mengendap dan terjadi pendangkalan pada Kawasan

kali yang umumnya berfungsi sebagai daerah penampungan air, hal tersebut tidak sekali saja terjadi namun sudah sejak dahulu terjadi pada masa Belanda, yaitu pendangkalan system kanal DAS besar morokrembangan yang menjadi tidak berfungsi lagi.

Kali mas diperkirakan dangkal lebih dari satu meter per tahun, melalui pendangkalan dan penumpukan sampah. musim kemarau, eceng gondok menyumbat kanal-kanal kecil dan mempercepat pendangkalan. Pengendalian banjir diperumit dengan penyebaran kota ke selatan kanal-kanal seperti banyu urip, gubeng, dan kalibokor yang dirancang untuk membawa air irigasi ke sawah lebih tinggi dari tanah sekitarnya menjadikan tidak cocok untuk drainase. Meskipun kotamadya menggunakan dana pemerintah pusat dan bank dunia untuk memelihara dan meningkatkan perluasan jaringan selokan dan saluran air, pengembaliannya pun akan tetap kecil karena masih banyak daerah yang belum ada sistem drainase yang benar-benar dapat membawa air banjir, dan proyek-proyek perumahan baru, yang meningkatkan laju limpasan.

Sistem pengendalian banjir telah diizinkan untuk dibangun ke selatan dan barat, meskipun upaya rehabilitasi telah dilakukan, masalah banjir telah menyebar ke wilayah yang lebih luas. Maka dari itu banjir Surabaya yang dikatakan abadi tentu masih memiliki tingkat kerawanan hingga masa sekarang.²³



Gambar 6. Peta kawasan rawan banjir daerah Surabaya
Sumber : RPJMD Surabaya

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan. Kota Surabaya terletak diantara 070 12' - 070 21' Lintang Selatan dan 1120 36' - 1120 54' Bujur Timur, merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Batas-batas wilayah Kota Surabaya sebagai

²² Ibid., hlm. 90.

²³ Howard Dick, *Surabaya city of work a socioeconomic history, 1960-2000* (Ohio: University Press, 2002), hlm. 169

menjadi 4 batas wilayah yaitu ²⁴



Gambar 1. Peta kota Surabaya
Sumber : Ditjen ciptakarya kota Surabaya

- Batas Utara : Selat Madura
- Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Batas Timur : Selat Madura
- Batas Barat : Kabupaten Gresik

Topografi Kota Surabaya meliputi:

- Kota pantai
- Dataran rendah antara 3-6 m di atas permukaan laut
- Daerah berbukit, di Surabaya bagian selatan 20-30 m di atas permukaan laut

Berdasarkan letak topografi yang telah disebutkan Surabaya memiliki tanah yang dapat dikatakan rendah dari permukaan air laut yang menjadikan daerah hilir rentan untuk menjadi limpahan debit air dan daerah rawan banjir sebagian besar (25.919,04 Ha) Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77 persen) dan sebelah selatan (6,52 persen) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5 - 15 persen.²⁵

Pada masa penghujan untuk itu kota Surabaya berdasarkan aliran sungainya dilewati oleh DAS Brantas yang bermuara di selat Madura. Aliran sungai Brantas bercabang dan membentuk 2 aliran sungai yaitu daerah Surabaya utara dan timur, aliran tersebut kemudian dilintasi mengalir dan mengitari kota dengan sebutan "kali yakni kali mas, kali jagir, kali Surabaya dan kali lamong.

Temperatur Kota Surabaya cukup panas, yaitu rata-rata antara 22,60 – 34,10 , dengan tekanan udara rata-rata antara 1005,2 – 1013,9 milibar dan kelembaban antara 42% - 97%. Kecepatan angin rata-rata perjam mencapai 12 – 23 km, curah hujan rata-rata antara 120 – 190 mm. Jenis Tanah yang terdapat di Wilayah Kota Surabaya terdiri atas Jenis Tanah Alluvial dan Grumosol, pada jenis tanah Alluvial terdiri atas 3 karakteristik yaitu Alluvial Hidromorf, Alluvial Kelabu Tua dan Alluvial Kelabu. Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30° C dan minimum 25° C.²⁶

Kota Surabaya dilalui oleh sungai yang sangat berpengaruh pada ketersediaan air baku dan sistem utama drainase kota. Beberapa sungai tersebut adalah Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kalimas dan Kali Makmur. Semua aliran air permukaan dan air buangan bermuara di sungai-sungai tersebut, sehingga akan berpengaruh pada kualitas air baku. Mengingat populasi penduduk Kota Surabaya semakin tinggi yang berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan air bersih dan air buangan, maka perlu adanya²⁷ pengelolaan kawasan daerah aliran sungai untuk mendukung fungsinya sebagai kawasan lindung.

Adapun terkait dengan pengelolaan Kawasan daerah aliran sungai rupannya mengalami penanganan permasalahan yang terjadi tidak semudah yang dipikirkan, banyak pihak yang harus diperhatikan dan menjadi problema yang cukup serius terutama pemukiman daerah bantaran sungai, adapun hal tersebut memiliki hubungan yang penting bagi pemerintah dalam mempertimbangkan dan membuat kebijakan sebaik-baiknya mengingat Surabaya memiliki kawasan yang strategis dan juga didukung dengan tersediannya berbagai infrastruktur yang telah memadai baik dari pelabuhan, industry, maupun jalur arteri penghubung pusat kota dan kabupaten yang telah berkembang pesat dalam aspek antar barang per wilayah.

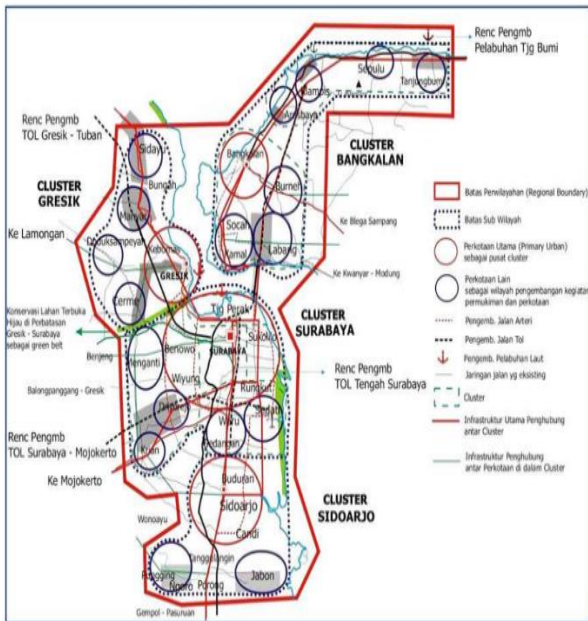
Hal tersebut dapat terjadi disebabkan Surabaya sudah lama dibentuk sejak colonial dimana pada masa perkembangannya, Surabaya pernah menjadi kota terbesar di Indonesia pada akhir abad ke 19 dan dapat dikatakan sebagai pusat ekonomi yang paling dinamis selain memiliki pemukiman di atas air di muara Kali Mas untuk Jalur perdagangan, Surabaya dapat dikatakan memiliki Kawasan hinterland yang subur, akses perdagangan pada waktu itu berpusat di daerah sepanjang Kali Mas yang diteruskan ke daerah-daerah pusat yaitu sekitar Jembatan Merah dan daerah-daerah perdagangan lainnya,

²⁴ Ditjen Cipta Karya, *Kota Surabaya* (Surabaya : Ciptakarya, 2001), hlm. 11.

²⁵ RPJMD kota Surabaya, *Gambaran umum kondisi daerah* (Surabaya: RPJMD, 2010), hlm. 1.

²⁶ RPJMD kota Surabaya, *op. cit.*, hlm. 7.

²⁷ Howard Dick, *Surabaya city of work a socioeconomic history, 1960-2000* (Ohio: University Press, 2002), hlm. 166.



Gambar 2. Surabaya dalam GERBANKERTOSUSILO
Sumber: RPJMD kota Surabaya, 2010

Pada tahun 1960, wilayah Kota Surabaya sebesar 67,20 km², pada tahun 1965 menjadi 224,58 km².²⁸ Hal tersebut disebutkan Surabaya telah mengalami perluasan wilayah sejak masa colonial hal tersebut disebutkan karena Surabaya telah menjadi pusat perdagangan yang dikatakan cukup besar, dengan ditunjang adanya peran Kali Mas sebagai sarana pendistribusian barang-barang dagangan pada waktu dan sangat menonjol sebagaimana produk-produk cultuurstelsel milik pemerintah belanda yang diperjual belikan yakni; gula, tembakau, kopi dimana dikirim ke pasaran Eropa.

Maka tak heran banyak pelancon dari berbagai daerah memilih untuk mencukupi kebutuhannya melalui migrasi salah satunya di Surabaya sebagaimana berdasarkan bukti peta Surabaya tahun 1923-1924 dan tahun 1867 menjelaskan kondisi topografi Surabaya yang mayoritas dikelilingi perairan dari pada daratan berubah sedikit demi sedikit menjadi pemukiman dan daratan yang digunakan sebagai rumah huni.

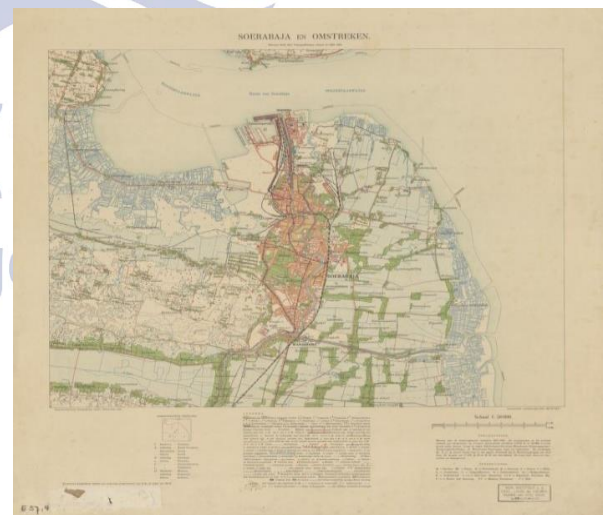
Adannya kepadatan penduduk yang signifikan inilah akan berdampak pada masalah bertambahnya pemukiman penduduk, jumlah penduduk dan kebutuhan tempat tinggal mengalami ketidak seimbangan, adanya permasalahan tempat tinggal berdampak pada para pendatang golongan menengah ke bawah, disamping lahan Surabaya yang terbatas modal tenaga kerja mereka yang tidak sebanding dengan masyarakat kota menjadikan para pendatang harus tetap bertahan hidup meski dalam keadaan yang sulit umumnya mereka lebih memilih untuk menggunakan lahan kosong milik pemerintah yang belum digunakan, bangunan pemukiman liar umumnya banyak berdiri di

bagian surabaya utara, daerah yang berdekatan dengan wilayah madura.

maka tak heran lambat laun wilayah resapan yang awalnya digunakan untuk penampungan air, lama kelamaan daerah resapan air hujan seperti hutan, rawa, dan danau alami menjadi menyusut. Adapun bentuk peta sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 3 . Peta Surabaya pada tahun 1867
Sumber : KITLV, 1867



Gambar 4. Peta Surabaya tahun 1923- 1924
Sumber : KITLV, 1923- 1924

Kebenaran sejarah bisa dibuktikan dengan banyaknya bangunan Belanda berupa rumah-rumah mewah di tepi-tepi sungai. Di sebelah timur Jembatan

²⁸ Mashud Mustain, *Surabaya sebagai kota kreatif* (Surabaya:

UNAIR), hlm. 3.

Merah Plasa (JMP) ke utara dan selatan, tepatnya di sebelah timur sungai, dalam aspek pemukiman banyak sekali ditemukan bangunan tua buatan Belanda yang dibangun pada tahun 1900-an, Selain Kali Mas, di sekitar simpang dan kayun tepiannya juga telah berubah menjadi sawah dan kebun sayur. Selain itu di jantung kawasan bisnis jembatan merah penghuni liar telah banyak membangun gubuk dan benar-benar menanam jagung dan singkong. di daerah wonokromo bagian tepi sungai juga pada masa itu dihuni beberapa perpanjangan ilegal dan gubuk liar.²⁹



Gambar 5. Penghuni liar tepi sungai, Keputran
Sumber : Howard dick, 1987.

Kondisi tersebut menjadikan pemerintah Surabaya mengambil kebijakan dalam penggusuran pada beberapa daerah tanah stren yang dirasa mengganggu jalannya aliran air pada bulan Maret 1976. Proyek mulai dilaksanakan dari pengerukan di bagian tengah sungai sekitar kayun, di mana hanya ada sedikit penduduk tepi sungai.

Selama tahun pembersihan, tepi sungai dimulai di Wonokromo dan terus ke utara. Setelah tepi dibersihkan, sungai dikeruk kembali ke dinding penahan bata yang lama terkubur yang dibangun oleh Belanda, perbaikan dalam pengendalian banjir dan sanitasi ditandai, melalui pengerukan pemeliharaan.

Masih diperlukan seperti halnya pengendalian terhadap reinfiltrasi penghuni liar. Ketika pekerjaan Kalimas hampir selesai, proyek serupa dimulai untuk merehabilitasi kali Pegirian, yang bercabang dari Kalimas di tengah kota di undaan dan kemudian mengikuti jalur paralel ke mulutnya Semampir, tepat di sebelah timur bekas pangkalan angkatan laut. Terkait dengan proyek tersebut Kotamadya tetap mendanai kompensasi dari penghuni tepi sungai yang dipindahkan.

Dari kelalaian penguasa berujung kematian: Wabah malaria Surabaya

Akibat pertambahan penduduk yang dapat dikatakan signifikan inilah masalah penanganan genangan air menumbuhkan solusi yang baru dimana perubahan penanganan baru terjadi saat wabah tifus dan malaria muncul yakni pada tahun 1700 dimana akibat munculnya wabah tersebut muncullah solusi baru dimana mengambil air dari air tanah menggunakan kran yang berkembang pada tahun 1870 yang mana sebelumnya mengambil air di sungai kini telah berganti, adapun dikarenakan sistem kanal yang dapat dikatakan dapat berhasil di Belanda ternyata tidak berlaku untuk Indonesia dikarenakan struktur tanah yaitu gambut sehingga tanah yang mengendap akibat proses sedimentasi menyebabkan air tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya dan mengendap menjadi suatu penyakit pada masa tersebut.

Fasilitas toilet juga tidak bersih, air minum diambil dari Kali Mas yang tercemar, dan tidak ada instrumen bedah yang dapat digunakan. Survei periode 1903 menghasilkan angka kematian 36 per seribu untuk Surabaya dibandingkan dengan 57 untuk Jakarta. Di kedua kota penyebab utama kematian dan kesakitan adalah sama yaitu malaria dan penyakit usus.³⁰

Fokus perhatian dalam penanganan malaria belum sepenuhnya terealisasi mengingat masyarakat banyak yang menganggap wabah tersebut merupakan mantra ataupun kutukan yang tidak bisa disembuhkan sampai pada tahun 1907 setelah Laveran mendapat penghargaan Nobel terkait Plasmodium malaria sebagai penyebab malaria dengan penularan melalui nyamuk, maka tahun 1911 Jawatan Kesehatan mulai melakukan penyelidikan pemberantasan malaria. Pada tahun 1929, biro malaria mulai mendirikan cabang di Surabaya dengan fokus pelayanan kepulauan bagian timur,

Penanganan dilakukan disekeliling titik baik daerah pantai, daerah pedalaman baik rumah warga, sawah, kolam tambak, saluran air sungai dsb. Usaha tersebut diupayakan dengan tujuan pemberantasan sarang nyamuk yang hinggap di area genangan air. Lambat laun penanganan malaria mulai bisa diatasi dengan baik.³¹

Adapun setelah wabah tersebut berakhir rupanya lingkungan yang sehat masih belum terelisasikan dengan baik dimana system birokrasi yang dijalankan pada masa orde lama pun turut menjadikan wilayah kota seperti Surabaya menjadi tidak teratur ditambah pengaruh perang yang menjadikan kerusakan disekeliling wilayah sehingga baik dari akses air bersih dan sulitnya ekonomi akibat inflasi menjadikan kota menjadi kumuh dan seperti gelandangan,

Pasca perang kemerdekaan kondisi Surabaya sangatlah kacau, para korban perang kehilangan pekerjaan, kebanyakan dari mereka tinggal ditempat yang bukan seharusnya gubuk banyak dihuni di

²⁹ Dukut Imam, *Hikajat soerabaia tempo doeloe Surabaya* (Surabaya: Arsip Jawa Timur, 2013), hlm. 65.

³⁰ Howard Dick, *Surabaya city of work a socioeconomic history, 1960-*

2000 (Ohio: University Press, 2002), hlm. 166.

³¹ Andi Arsunan, *Malaria di Indonesia tinjauan aspek epidemiologi* (Makassar: Massagena Press, 2012), hlm. 18.

sebagian titik kota adapun pengaruh urbanisasi yang kian melonjak dari desa dengan tujuan mengadu nasib.³²

Peranan Walikota dalam upaya penanganan banjir sebelum era Soekotjo

Doel arwono. Walikota yang menjabat di Surabaya pada tahun 1942- 1952 an. Pada masanya dalam upaya penanganan banjir, di rasa kurang dalam perencanaan tersebut, dimana yang difokuskan yakni pada awal menjabat dengan berkembangnya pribumi dengan diberikannya sejumlah pinjaman dan bekerja sama dengan lisensi usaha swasta³³ yang menjadikan ekonomi yang BERDIKARI dan dalam upaya Revolusi kemerdekaan, atas dasar tersebut upaya yang ditingkatkan dengan tujuan pemulihan ekonomi berdampak pada pemeliharaan pemukiman yang kurang tertata dengan baik, masalah pemukiman liar merupakan sebuah dilema bagi pemerintahan kota Surabaya pada waktu itu, sepanjang bantaran sungai kalimas dibangun, beberapa pasar tradisional seperti pasar pabean, pasar atom, pasar genteng dan pasar blauran yang menjadi proyeksi pusat ekonomi pada masa tersebut,³⁴ hal ini menyebabkan, permasalahan banyaknya masyarakat yang tinggal secara sembarangan dengan mendirikan bangunan secara liar dan surat tanah dalam beberapa komplek pemukiman yang belum disahkan dengan jelas, menjadikan focus permasalahan pada masa tersebut. System kebijakan tanah partikelir yang diwujudkan dengan dana bantuan pemerintah kota sebanyak- banyaknya Rp 25,-³⁵ dengan imbal pengerjaan tanah untuk bercocok tanam sayuran menjadikan semakin menyempitnya daerah resapan genangan air pada masa tersebut,, terkait dengan upaya penanganan banjir pada era Arwono baru muncul ketika 1950an dimana pada masa akhir periodennya.

Meskipun dengan dana yang dikatakan cukup terbatas aspek penanganan dimulai dari yang terkecil dalam rangka tanggap darurat, upaya perbaikan kampung dengan tujuan penanganan banjir terkait sanitasi dijalankan dalam skala yang lebih terbatas, adanya rencana perbaikan dilakukan di sejumlah kampung, seperti Gubeng, Klingsing, Ketandan, Kebangsren, Keputran dan Pacarkembang, tidak hanya itu Selain memperbaiki kampung, pemerintah juga mengalokasikan sejumlah dana untuk membeli tanah untuk pembangunan drainase di Greges, PlosoBogen, Oro-oro, Gersikan, karanggayam, dan Pacarkembang. Semua lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan drainase sekitar 100 hektar. Namun karena keterbatasan anggaran, beberapa kampung baru baru diperbaiki pada tahun berikutnya,³⁶

Dalam kondisi tertentu pembenahan kampung tidak bisa diselesaikan secara tuntas terutama pada system drainase, kondisi tersebut disebutkan dalam surat yang diteruskan ke DPDS KBS. Adapun pandangan tersebut juga di ditujukan oleh Silas terkait pemerintahan pada masa itu dimana dalam perubahan decade 1950-an hingga 1960- an terus menurun dan semakin parah, adanya pengaruh politik pada gesekan kekuasaan menjadikan kecenderungan bahwa pemerintah membiarkan orang- orang dari desa masuk ke kota tanpa halangan. Hal inilah yang menyebabkan kondisi pemukiman liar semakin menjadi terutama di sepanjang drainase baik besar maupun kecil, taman, ladang, dan bangunan.³⁷

Pengaruh lain juga berasal dari luapan kali lamong yang tidak dapat terbendung saat musim hujan, hal tersebut disebutkan bahwa banjir diakibatkan oleh meluapnya sungai Brantas yang terjadi karena sedimentasi dan pengaruh selokan- selokan sekitarnya yang dirasa belum tertata dengan baik bahkan dapat dikatakan telah rusak karena telah lama ditinggalkan Belanda, ditambah banyaknya pegundulan hutan yang sudah berlangsung sejak zaman Jepang. Adapun terkait dengan perkembangan Walikota selanjutnya hingga akhir sebelum era Soekotjo realisasi pembangunan penanganan banjir mulai berlangsung kembali pada tahun 1965 setelah orde baru tampil. Itupun baru bersifat perbaikan dan peremajaan atas kondisi fisik kota yang mengalami degradasi hebat karena kurang terpelihara di masa - masa lalu, sejak masa pendudukan Jepang.

Adapun kondisi kota Surabaya menjelang diawalinya Pelita 1 oleh Pemerintah Orde Baru , tercermain pada kenyataan:

Prasarana jalan banyak mengalami kerusakan , Jalan - jalan protokol terlalu sempit untuk dapat menampung arus lalu lintas kendaraan. Daerah pinggiran kota 5 Kecamatan baru : Karangpilang , Wonocolo , Sukolilo , Rungkut dan Tandes sangat sukar dicapai. Bangunan - bangunan assainering serta pompa air banyak yang sudah tidak mampu berfungsi karena termakan usia dan sangat rusak. Kalimas, demikian dan juga waduk Morokrengan, mengalami penyempitan dan pendangkalan, dan yang terakhir penggunaan tanah dalam kota tidak teratur.³⁸

Penataan Ulang Kota Surabaya Sebagai Jalannya Politik Orde Baru

Pemaparan mengenai jalannya politik orde baru penting dibicarakan di sini karena proyek penanganan banjir di Surabaya tidak dapat muncul secara tiba-tiba akan tetapi lebih disebabkan oleh kondisi bangsa Indonesia dengan penstabilan

³² Agus Wahyudi, *Sketsa tokoh Suroboyo* (Surabaya: Selasar, 2006), hlm. 274.

³³ Purnawann Basundoro, *dua kota tiga zaman* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 127.

³⁴ Mita Indrawati, *Peran doel arwono di Surabaya tahun 1945- 1952* (Surabaya: Jurnal Avatara), hlm. 218.

³⁵ Basundoro. *Op. cit.*, hlm. 128.

³⁶ Sarkawi B. Husein, *peningkatan kampung sebagai instrument mitigasi banjir di Surabaya* (Surabaya: Humaniora, 2015), hlm 320.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 323.

³⁸ Sub bagian humas & protokol, *Surabaya dalam lintas pembangunan* (Surabaya: kota madya daerah tingkat II, 1980), hlm. 122.

lingkungan yang baik dan sehat demi teraturnya jalannya pergerakan ekonomi kedepannya, melihat kilas balik sejarah wabah malaria yang terjadi menjadikan pihak walikota mulai melakukan banyak pembaruan program kerja, tentunya program tersebut terjadi semata-mata bukan atas dasar landasan pemerintah Surabaya saja melainkan program kerja yang dibebankan berdasarkan surat perintah Presiden, adapun hal tersebut ditandai dengan situasi perubahan ekonomi, social dan politik masa orde baru terlebih dahulu yang penting untuk dijelaskan

Hutang Indonesia pasca kepemimpinan demokrasi dipimpin yang berjumlah \$2.358 juta menyebabkan awal pemerintahan orde baru mengalami inflasi yang melambung tinggi, jatuh tempo pelunasan hutang yang dimulai pada tahun 1966 dengan pembayaran selama 7 tahun dengan pelunasan awal sebesar \$600 juta³⁹. menjadikan pemerintahan orde baru membentuk tim ahli di bidang ekonomi dan keuangan yang dikenal dengan sebutan Mafia Barkeley selain ditugaskan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari luar negeri, umumnya penyesuaian program tersebut dilalui oleh tiga tahap pemulihan ekonomi yaitu, stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan.

Pelunasan hutang lama yang disebabkan pada masa demokrasi dipimpin rupanya ditujukan dengan maksud untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia, akses kebijakan dari keterbukaan antara masa orde lama dan orde baru sangatlah berbanding terbalik dimana pada masa orde baru ini dalam penerapan kebijakan lebih pro kepada barat dengan keperbihakannya yaitu pembangunan nasional, kepercayaan tersebut ditandai dengan masuknya kembali Indonesia ke PBB.

Orde baru di Indonesia sangat kental dengan pemerintahan yang dipimpin dengan campur tangan aparat dalam beberapa aspek, selain penataan ekonomi. Pada masa orde baru juga cukup menata ulang tatanan pemerintah untuk kestabilan politik, gejolak politik dalam negeri yang terjadi pada masa pemerintahan orde lama akibat penerapan kebijakan yang dibuat oleh Soekarno dengan konsep BERDIKARI juga turut menyulut turunnya jabatan orde lama pada masa tersebut dimana kelangkaan bahan pokok dan pembangunan dengan tujuan politik yang dijalankan Soekarno menyebabkan utang luar negeri kian membengkak.

Oleh karena itu pada tahun 1969 bisa dikatakan masa transisi, dimana dengan kebijakan orde baru yang dijalankan. Kenaikan harga bisa ditekan sekitar 10% selama tahun tersebut. Dalam REPELITA 1 investasi pemerintah lebih ditanamkan pada bidang usaha yang menghasilkan dampak yang lebih besar, seperti

pertanian, infrastruktur ekonomi, dan perluasan industri ekspor dan impor.

Kebijakan Pemerintahan orde baru yang dibuat dalam program berkala tersebut semata-mata memiliki tujuan yaitu atas dasar terciptanya kestabilan politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965, untuk itu pembangunan merupakan syarat utama atas dasar kepemimpinannya dengan titik tumpu pembangunan yang bersifat sentralistik dimana terpusat pada daerah tertentu seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang maka tak heran meskipun dijuluki bapak pembangunan namun masih terdapat banyak daerah-daerah lain di Indonesia yang belum dilakukan pembangunan secara merata, lain halnya dengan sekarang berpusat pada desentralisasi dimana daerah dituntut untuk melakukan pembaruan dalam berbagai hal dari berbagai sektor.

Sehubungan dengan kepemimpinan yang bertumpu pada sentralisasi dengan berfokus kepada kota-kota besar salah satunya yakni kota Surabaya pada masa tersebut dalam penataan ulang kota Surabaya dipimpin oleh Walikota Raden Soekotjo, ia menjabat disebabkan kekosongan Walikota Pemerintah Surabaya sebelumnya yakni Moerachman yang dikabarkan hilang bersamaan dengan peristiwa pembantaian PKI pasca peristiwa G30SPKI,

Soekotjo merupakan anggota TNI AD yang kemudian diangkat untuk bekerja dalam pemerintahan, maka tak heran gaya pemerintahan yang ia jalankan sangatlah tegas hal tersebut dibuktikan dimana pada zaman pemerintahannya berbagai pembaruan baik pembangunan Sier sebagai pusat industri, terminal Joyoboyo, dan pembangunan jalan Margomulyo untuk akses dengan Gresik, pembangunan sarana infrastruktur baik dari penanganan banjir dan pelebaran jalan dapat ia selesaikan saat ia menjabat

Umumnya proyek-proyek tersebut ia jalankan pada dasarnya disebabkan dengan campur tangan pemerintahan orde baru yang disebut dengan proyek REPELITA, dalam upaya pembangunan pada zaman tersebut dilegalkan segala cara selain tujuan kemakmuran juga sebagai sebab penekanan inflasi pada masa pemerintahan Soekarno dulu, keterpurukan pasca perang dunia II dan adanya perang Korea yang mempengaruhi ekonomi dunia.

Dana yang di dapatkan untuk pembangunan Surabaya dilakukan dengan mencari bantuan seperti bantuan IGGI (inter government group on Indonesia)⁴⁰ yang didorong oleh kondisi Indonesia yang tidak stabil akibat harga barang yang melonjak tinggi, selain itu kebijakan pelegalan perjudian juga turut dijalankan, mengingat keuangan negara yang mengalami devisa.

Sehingga kebijakan tersebut oleh Walikota dijalankan sebagai menambah pendapatan daerah, hal tersebut dilakukan dikarenakan pemerintah tidak mau membebaskan pajak-pajak kepada masyarakatnya

³⁹ CSIS Indonesia, *Dimensi politik ekonomi pembangunan nasional: kebijakan dan reformasi* (Jakarta: Analisis CSIS, 1996), hlm. 38.

⁴⁰ Budiman, *Reformasi dan inovasi tata kelola pemerintahan*

(Makassar : Fisip Universitas Mulawarman), hlm. 2.

IGGI adalah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1967 untuk menkoordinasikan bantuan dana bagi Indonesia, kelompok yang diketuai oleh Belanda ini tercatat memberikan bantuan kepada Indonesia selama 25 tahun

ditambah keadaan ekonomi yang sulit, karena hasil yang didapat dirasa dapat meringankan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.⁴¹ Kebijakan tersebut berakhir hingga tahun 1968 dimana dirasa banyak dampak buruk yang terjadi dibandingkan dampak baiknya, akibat psikis masyarakat yang dihasilkan akibat kecanduan permainan judi.

Penanganan Masalah Banjir (Drainage) Pada Kawasan Tanah Stren Surabaya

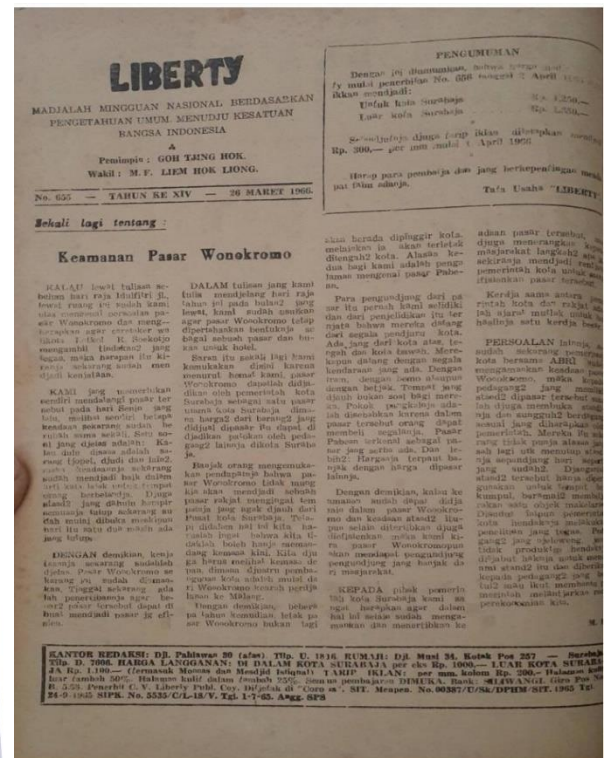
Apabila dilihat dari ledakan penduduk yang terjadi akibat dibentuknya Surabaya sebagai pusat industri menjadikan lahan Surabaya kian menyempit, tanah illegal tidak menjadikan masyarakat untuk memilih bertahan di Surabaya dibangun menyerah memilih pulang ke kampung halamannya.

Umumnya penaplikasian yang dilakukan yakni dengan cara mendirikan pemukiman liar di sepanjang kali, kebiasaan tersebut rupannya tidak hanya terjadi pada 1 masa saja. Dilihat dari sejarahnya, masyarakat Surabaya memang mayoritas tinggal di pinggir sungai, mengingat pada waktu itu Sungai Mas berfungsi sebagai sarana transportasi utama masyarakat Surabaya yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan penghasil rempah-rempah dengan Pelabuhan Tanjung Perak.

Kebijakan dalam penggunaan tanah setren pada masa soekotjo dijalankan, hal tersebut mengingat jalannya air Surabaya dapat diatur oleh pusat sehingga tidak akan membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitaran tanah stren. Sebaaimana dengan surat yang dikeluarkan oleh walikota kepada dinas pekerjaan umum (bidang pengairan) pada tanggal 11 januari 1966 No.: I.22/14. Sebagai berikut:

"Maka dengan hormat,perkenankanlah kami dengan ini ,memberikan sekedar pendjelasan tentang persoalan sebagaimana tersebut didalam pokok surat ,yang kirannya mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pemecahan Surabaya ,dan pembangunan untuk mencapai kemajuan dan penertiban terutama diatas tanah "Setren" yang penguasaannya berada pada pemerintah daerah tingkat 1 djawa timur cq.daerah pengairan "Brantas" Mojokerto."⁴²

Adapun sejarah pemindahan wilayah penduduk di sepanjang stren kali disebabkan dengan pengusuran dan penertiban wilayah Surabaya, dimana opsi pemindahan pertama kali yakni pada saat pembangunan perluasan pasar wonokromo tahun 1964, terdapat pemindahan sekitar 50 pedagang dari pasar wonokromo oleh walikota Sukotjo



Gambar 7. Penertiban keamanan pasar wonokromo dengan dampak pengusuran dan penempatan tinggal warga ke bantaran

Sumber : Sub bagian humas dan protokol kotamadya daerah tingkat II Surabaya, tahun 1980

Hal demikian dilakukan dikarenakan tempat tersebut akan digunakan sebagai terminal bemo yang menyebabkan walikota memberikan 2 opsi pemindahan di dalam pasar dengan ukuran took yang relative kecil yakni 2,5 x 4m dan yang kedua dipindah di daerah jagir-wonokromo ditepi sungai, pedagang tersebut akhirnya banyak yang memilih untuk dipindah ke daerah stren jagir wonokromo dengan memberikan pemindahan serta hak untuk mendirikan bangunan baru yang ada di stren kali⁴³, akibat tindakan yang dilakukan kemudian menyebabkan masyarakat yang lain meniru dan membangun bangunan secara meluas tindakan tersebut pernah di tindak lanjuti dengan penekanan masyarakat untuk tidak secara massif mendirikan bangunan secara liar tanpa persetujuan dari pemerintah kota Surabaya pada masa itu.

Mengingat :

- Banyaknya rumah/ bangunan dipinggir sungai dalam wilayah kotapradja Surabaya yang mengganggu keindahan kota dan tidak sesuai seperti apa yang direncanakan (stands plan_ning).-
- Keadaan sub.s akibatnya bias mengganggu mengalirnya air yang bisa menyebabkan banjir yang merugikan masyarakat/kota Surabaya.

Minta dengan hormat agar:

⁴¹ Januar Eko., *Program karantina judi : proyek walikota Soekotjo di Surabaya* (Surabaya: Skripsi UNAIR, 2016), hlm. 2.

⁴² Arsip Kota Surabaya No.j.24/163, tahun 1966, masalah banjir (drainage) dalam kotapradja surabaja.

⁴³ LHKI Surabaya, *Sejarah pemukiman dan kronologi pengusuran Kawasan jagir Surabaya*. <http://lhkisy.blogspot.com/2009/05/sejarah-pemukiman-dan-kronologi.html?m=1> . Diakses tanggal 20 mei 2009 pukul 09.25.

1. Dihentikannya pemberian idzin persewaan tanah2 dipinggir sungai dalam wilayah kotapradja surabaja, yang dibawah wewenang saudara.
2. Izin yang sudah dikeluarkan hendaknya bisa ditinjau kembali.⁴⁴



Gambar 8. Bangunan- bangunan di tepi sungai mengurangi dan menghilangkan fungsi sungai sebagai saluran pembuangan.

Sumber : Sub bagian humas dan protokol kotamadya daerah tingkat II Surabaya, tahun 1980

Kampung stren pertama kali didirikan yakni kali wonokromo, dimana pada tahun 1950 merupakan lahan kosong dengan jalan setapak dan banyak ditumbuhi oleh ilalang, glagah, dan rumput liar. Pada awalnya di daerah ini tidak boleh ada bangunan tanpa seizin Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya. Pada tahun 1970 telah banyak dibangun rumah permenen yang dihuni sebagian besar oleh pedagang, pemulung, dan tukang becak. Pada tahun 1975, warga mulai membayar Pajak Ipeda. Sejak tahun 1983, warga yang tinggal di daerah bantaran sungai sudah bisa menikmati aliran listrik.

Daerah wilayah stren mulai diperebutkan orang sejak 1961. Peningkatan mulai berarti pada tahun 1976-1980, dan mengalami puncak pada 2001. Sedikitnya ada sekitar 5000 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sepanjang bantaran sungai di Surabaya, jumlah kepala keluarga untuk masing- masing wilayah dapat dilihat pada table berikut.⁴⁵

Jumlah warga Stren Kali Surabaya

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jagir	305	746	610	1.356
2	Bratang	323	656	687	1343
3	Barata jaya	66	102	111	213
4	Gunungsari	24	54	50	104
5	Jambangan	66	124	132	255
6	Kebonsari	22	41	40	81
7	Pagesangan	27	49	43	92
8	Kebraon	100	189	166	355
9	Karang pilang	100	190	184	374
10	Gunungsari	300	0	0	300
	Total	1.333	2.150	2.020	2.020

Sebagaimana dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, walikota Soekotjo selain memperhatikan unsur dari pemukiman terkait dampak dan resiko apabila dibangun, juga memperhatikan dampak yang terjadi. Apakah merugikan bagi masyarakat atau tidaknya, adapun terkait pemahaman yang didapat dengan melihat beberapa sector salah satunya dinas pengairan kali brantas dan bangunan penahan debit air yang ada di Surabaya memberikan hasil akhir yakni umumnya pengendalian banjir disebabkan dengan pemusatan pengendalian air yang disebut dengan I.A.B (*irrigate afdeeling brantas*) dimana kantor penendalian banjir ini berada di Mojokerto. Pembangunan kantor pusat ini dilakukan sejak zaman belanda, lewat pengendalian aliran yang dilakukan sepanjang aliran brantas, areal perkebunan tebu, pertanian, dsb dapat terkontrol dengan baik, atas dasar itulah penggunaan tanah stren dirasa baik dijalankan pada era Soekotjo ini, karena selama kantor pusat dapat mengendalikan arus debit air secara baik maka dirasa tidak akan merugikan masyarakat disekeliling sungai tersebut .

'Adapun batas2 tanah cadangan (setren) ini dibeberapa tempat masih terdapat pal2 batas dengan tanda pengenalan I.A.B (*irrigate afdeeling brantas*). Sebagaimana kami uraikan diatas, maka fungsi tanah setren begitu jauh ada tangkis2-nya jalan , untuk eventueel menampung air banjir melebihi normal yang secara periodic (tidak terus menerus) mengalir melalui Kali Mas, sehingga tidak terjdjadi banjir overslag, dengan kata lain, bahwa dipakai/tidaknya tanah setren tersebut untuk aliran banjir tergantung dari cara dan banyaknya air banjir yang masuk/ dimasukkan dalam kali tersebut (banjir eksploitasi).'⁴⁶

Adapun pembahasan terkait bangunan warisan colonial ini sampai sekarang ternyata masih ditempati dan diganti menjadi dinas PU pengairan kabupaten

⁴⁴ Arsip Kota Surabaya No.7804/939, Tahun 1965, idzin persewaan tanah- tanah dipinggir sungai (stren).

⁴⁵ Soenyono, *Perkembangan permukiman di bantaran sungai Surabaya*

dari prespektif sosiologi (Malang: Jurnal penelitian humaniora, Vol. 11, No. 2. 2006), hlm. 95.

⁴⁶ Arsip kota Surabaya No.7804/939, op. cit., hlm. 2.

Mojokerto, dimana pembangunan I.A.B ini didasarkan dengan pengaruh tanam paksa, untuk pengairan tebu dibutuhkan air yang cukup untuk itu pemasokan air diambil dari sungai brantas, saluran air tersebut ditambah dengan adanya pembangunan Dam lenkong yang di bangun pada tahun 1832, umumnya pasokan air Dam lenkong hampir semua salurannya dialirkan di wilayah persawahan wilayah sidoarjo berbeda halnya dengan sungai brantas dimana alirnya terbagi menjadi dua cabang yakni pada pintu air mlirip yang kemudian mengalir ke kalimas menuju Surabaya, dengan demikian maka keberadaan kantor I.A.B ini dirasa penting untuk wilayah Surabaya dikarenakan fungsinya lebih banyak menontrol debit air yang masuk ke Surabaya⁴⁷.

Akses Proses Masuknya Aliran Air Sungai di Surabaya

Aliran sungai tersebut menjadi pembahasan yang cukup serius pada masa tersebut di mana Soekotjo berkeinginan untuk mengatasi masalah banjir di Surabaya dengan membuat rancangan rencana terkait pembangunan yang akan diproyeksikan sebagai rencana jangka pendek yang dituangkan dalam surat arsip adapun sebagai berikut ;

"Dari peta konstruksi tentang exploitasi banjir yang bersama ini kami lampirkan, maka penyaluran air banjir melalui kali mas (kota surabaya) ada erat hubungannya dengan exploitasi banjir kali brantas dalam keseluruhannya, yang sejahtera singkat namun cukup jelas dapat kami terangkan sebagai berikut :

I. Jalan utama penyaluran banjir
Jurusan jombang- Mojokerto- porong -laut
Diatur dengan schotbalk slis lengkung yang terkenal dengan rolag mempunyai 10 lobang a 10.00 m. dengan 98 biji balok .

Q. maximal : hulu bendung ada 1400 m³/dt.
Dan hilir bendung = 1100 m³/dt.

II. Jalan ke II
Slis mlirip – k.surabaya- slis gunungsari -slis djagir - kanal wonokromo laut.

III. Jalan ke III
Slis gedeg -djetis- k.marmoyo -k.surabaya- gunungsari- djagir- kanal wonokromo- laut.

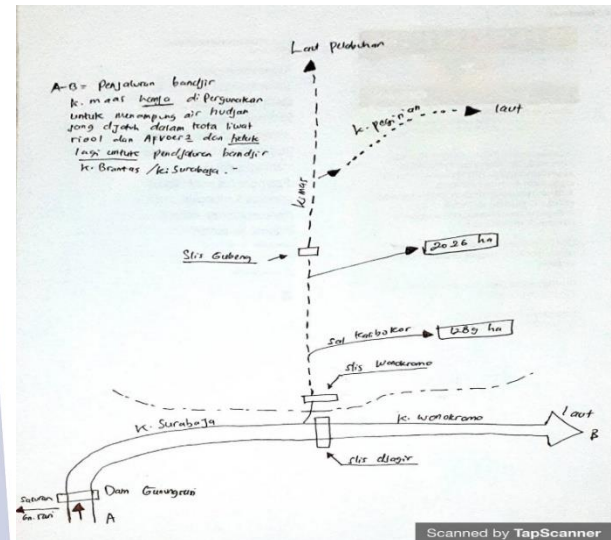
II-III pada umumnya dilakukan bersama-sama diatur *"naar verhouding "* dengan mengingat akan daya muat dari pada K. Surabaya bagian: mlirip- sepanjang, karena bagian sepanjang -laut keadaan kali cukup lebar.

Debit banjir mlirip dimasukkan =150 -240 m³/dt

Debit banjir gedeg = 50-150 m³/dt

Berhubung dihapuskannya sebuah pembuangan dari kali bantas menuju kali Surabaya yaitu slis

kedungdroro. Dengan demikian maka banyaknya air banjir yang dialirkan ke jurusan Surabaya K.brantas telah berkurang dari opzet semula = 440- 500 m³ menjadi 350 m³ berarti berkurang 150 m³ yang tidak sedikit artinya bagi keamanan kota Surabaya terhadap bahaya banjir , yang menjadi pokok tujuan kita 2 tahun terakhir ini telah dilaksanakan terbukti dari tidak terndamnya jalan Lumumba di P.N Iglas, barata dsb. '48



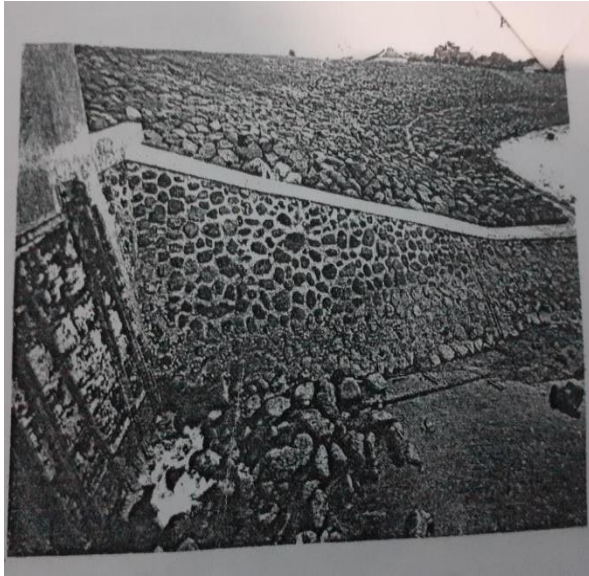
Gambar 9. Saluran penyaluran banjir yang dirancang untuk Surabaya

Sumber : Arsip kota Surabaya 1966

Maka dari itu dengan lebih memperhatikan factor-faktor yang sangat mempengaruhi penyaluran banjir seperti : pasang surut laut, penanganan pertama pada waktu meninjak musim hujan , yakni dengan dipergunakannya cakupan Kali Brantas, jombang-Mojokerto sebagai "penyangga" sehingga air dapat terhandle dan datangnya tidak secara bersama-sama (kelebihan beban), maka exploitasi banjir akan dapat berjalan lebih terpimpin dan terkontrol. Apabila dalam keadaan yang memaksa, peranan air yang disebabkan berlebih dari Kali Brantas sebagian masih dapat dimasukkan dalam magetan dan porong kanal sebanyak 25 m³/dt.,dengan demikian dalam hal ini maka Kali mas tidak lagi menampung air banjir dari kali, melainkan khusus untuk penyaluran air hujan yang jatuh didalam kota lewat system pembuangan limbah yang terdapat dalam kota.

⁴⁷ Moch. Chariris. Irrigatie afdelin brantas, sang pengendali banjir kota pahlawan.
<https://radarmojokerto.jawapos.com/nasional/18/10/2017/irrigatie>

[afdeling-brantas-sang-pengendali-banjir-kota-pahlawan/](#), Diakses tanggal 18 october 2017 pukul 20:14.
⁴⁸ Arsip kota Surabaya No.7804/939, op. cit., hlm. 2.



Gambar 10. Perbaikan klep dalam rangka menormalkan fungsi saluran pembuangan
Sumber : Sub bagian humas dan protokol kotamadya daerah tingkat II Surabaya, tahun 1980.

Untuk itu diperlukan untuk menengok kembali masalah banjir dalam kota surabaya yang telah ramai dibicarakan dalam sejarah dalam kurun tahun 1918 dimana pernah terjadi banjir, untuk keluar dari bencana tersebut diperlukan pembebasan kota/ kabupaten surabaya dengan menengok kembali catatan dalam laporan biro pekerjaan umum yang telah dirancang sejak tahun 1918, dengan kesimpulan yang ada maka Soekotjo kemudian merencanakan batas-batas penampungan air di Surabaya yaitu dengan debit maximum untuk kali wonokromo yaitu 320 m³/dt. Dan kali mas 30 m³/dt. Untuk itu tak heran jembatan-jembatan dan lebar kalimas masih dibiarkan lebar meskipun penduduk dari luar kota Surabaya mulai bermigrasi ke kota tersebut hal tersebut dilakukan agar debit air yang masuk masih bisa dijangkau dan tidak melebihi dari ukuran yang diperlukan.

Wilayah Dominasi Perusahaan: Pembaruan Perbaikan Saluran Sebagai Upaya Pencegahan Banjir

Adapun akses yang dirancang pada dasarnya mengacu pada perputaran ekonomi sebagaimana lanjutan penangan banjir berada pada jalan darmo dimana sejak tahun 1950 dengan diberikannya pinjaman adanya lisensi usaha swasta pada tahun 1952, pemerintahan kota Surabaya membuat kantor lingkungan darmo II di jl. Doho, no.20- yang memiliki fungsi sebagai pendaftaran perusahaan swasta, adapun dalam lingkup darmo sendiri sudah ada perusahaan dengan 44% mendirikan perusahaan yang bersifat kebutuhan primer, dan 56% bersifat kebutuhan sekunder. Adapun yang dimaksud dalam kebutuhan primer seperti: beras, kebutuhan pokok, depot makanan, obat-obatan, yang mana sangat diutamakan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan untuk kebutuhan sekunder seperti: penjual tekstil, furnitur, bengkel, penjahit, dan sebagainya, diperuntukan untuk orang-orang tertentu yang pada dasarnya memiliki uang lebih. Darmo memang pusat kota sehingga banyak yang mendirikan perusahaan swasta disana, darmo memainkan peran penting dalam perkembangan kota surabaya pada waktu itu dan telah terdaftar ijin usaha sebanyak 280 pengusaha pada tahun tersebut, jika diprosentasekan 81% berasal dari pengusaha tionghoa dan 19% nya berasal dari pribumi. pengusaha tionghoa menjadi ukuran, karena mereka sangat pandai untuk memilih tempat dalam mendirikan usaha.

maka dari itu berdasarkan catatan hasil rapat pada tanggal, 10 april 1966 walikota Soekotjo membuat proyeksi penataan daerah darmo agar menjadi tempat yang nyaman utamanya dalam penanganan banjir agar bisa berjalan perputaran ekonomi dengan baik pada masa itu adapun catatan yang dibuat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Catatan hasil2 rapat pada tanggal, 10 april 1966 dan tgl. 15 april 1966 tentang mengatasi daerah banjir darmo.

I. PENDAHULUAN :

Dari catatan2 yang dibuat oleh kepala dinas pengairan seksi wonokromo Sdr. R. Soetarjo dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

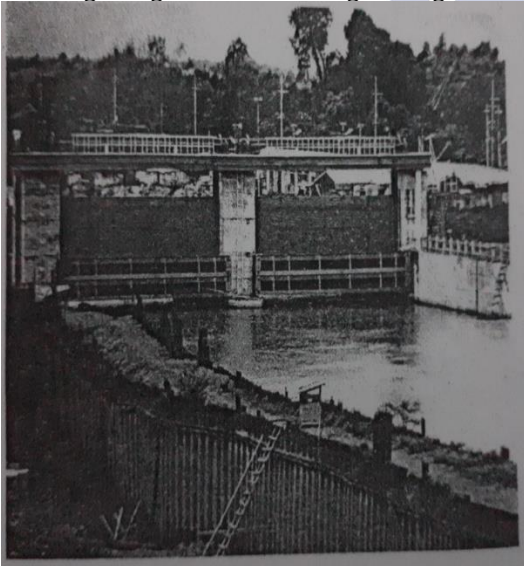
- 1) *Daerah Darmo termasuk daerah yang rendah, lagipula terletak dalam suatu "kom"*
- 2) *Pada tiap2 hujan, air yang jatuh didaerah itu hamper tidak dapat mengalir dengan sendirinya ketempat2 yang lebih rendah meleluo riool2 dan got2 kota.*
- 3) *Oleh karena itu, dengan mengiringkan air hujan dari daerah tersebut disediakan 3 buah pompa besar dari kotamadya Surabaya yang memompa dan mengalirkan air hujan itu kekalil Surabaya di gunungsari dan kekalil mas di ke klitran dan darmokali.*
- 4) *Jika didalam kota Surabaya jatuh hujan agak lebat selama kurang lebih ½ jam (kumpulan hujan +- 30 mm.) maka jalan kutai dan sekitarnya biasanya sudah tergenang dan walaupun sudah digunakan kompa2 milik kota madya Surabaya, keringnya masih memakan wantu antara 3 s/d 6 jam*
- 5) *Apabila dikota dan sekitarnya. Jatuh hujan lebat selama +- jam (ukuran hujan leboh dari 50mm.), boleh diastikan bahwa selain air hujan yang langsung jatuh di daerah tersebut dalam jumlah yang lebih besar, masih ada tambahan lagi dari lubernya / meluapnya saluran gunungsari yang mengalir di sebelah baratnya, karena tidak kuat menampung air hujan yang sebanyak itu, yang dating dari lereng2 pegunungan di sebelah barnya saluran .(pegunungan pakis). Keadaan ini yang sering juga disertai dengan putusnya tangkis kanan saluran gunungsari di beberapa tempat, tentunya yang menjejalkan genangan yang lebih luas dan lebih tinggi selama 24 s/d 72 jam, meskipun sudah*

di kerahkan semua pompa2 kota madya yang ada (pompa gunungsari, Darmo dan Keputran).

6) Kesimpulanya :

Jadi suatu genangan hanya dapat lekas menjadi kering, jika pengalirannya/ pembuangannya air dapat berjalan dengan lancar dan tepat, atau jika banyaknya pembuangan air seimbang dengan datangnya air, halaman tidak dilakukan di daerah2 yang rendah /datar, apalagi daerah2 yang merupakan suatu "kom" seperti daerah darmo ini. Dan cepat atau lambatnya pengaliran/pembuangan air hujan itu, tergantung Baik dan bersihnyakeadaan got2 dan riool2 kota yang harus mengalirkan hujan.. baik tidaknya keadaan/jalannya pompa2.⁴⁹

Selain disebabkan dengan pengaruh rendahnya permukaan tanah pengaruh lainnya yakni berasal dari sering meluapnya saluran gunung sari, dimana akses saluran gunungsari memiliki fungsi sebagai berikut.



Gambar 11. Pembangunan Dam (pintu air) gunungsari dalam rangka pelaksanaan proyek Brantas hilir, Sumber : Sub bagian humas dan protokol kotamadya daerah tingkat II Surabaya, tahun 1980.

1. Saluran gunungsari yang panjangnya 20 km. lebih itu merupakan suatu saluran pengambilan untuk mengairi sawah seluas +- 1300 Ha. Didaerah banyuurip, simo, tandes , balong, kandang sampai benowo (cerme).
2. Selain fungsinya sebagai saluran pengambilan, saluran tersebut, apabila di Surabaya jatuh hujan, berubah menjadi saluran pembuangan, yang harus mengalirkan air hujan yang jatuh dilereng2 pegunungan sebelah baratnya (Pakis gunung), sebagian kembali ke gunungsari dan sebagian lain ke simo dengan jarak masing-masing +- 3 km.
3. Karena curamnya lereng2 pegunungan tersebut, maka air hujan juga jatuh ditempat2 itu mengalir

dengan derasnya masuk kesaluran gunungsari, dengan tidak jarang membawa bahan2 erosi (tanah dsb.), begitu juga dari kompleks tandon air wonokitri tanahnya sering longsor.

4. Karena tempat datangnya air dari pegunungan dan lambatnya mengalirnya air dalam saluran, maka sudah barang tentu, apabila ada hujan yang lebat (50 mm. keatas) dan cukup lama (+- 1 jam) mudah sekali menyebabkan lubernya atau meluapnya air saluran tersebut dengan kadang2 disertai dengan putusnya tangkis. Selain dari itu masih ada faktor2 lain yang lebih penting yang menyebabkan lobernya/ meluapnya air saluran itu, ialah :

- a) Air kali brantas/ kali Surabaya banyak sekali mengandung walut dan pasir, sehingga semua saluran yang menerima air asal dari Brantas (termasuk saluran gunungsari), mudah sekali mendangkal dan menjepit ; apalagi kalau ditambah dengan sampah2 yang dibuang oleh penduduk sekitarnya setiap hari kedalam saluran itu, sedang dari pihak pemerintah (dinas pengairan) tidak dapat disediakan keuangan untuk pengalihannya, yang mestinya dikerjakan setiap tahun.
- b) Dimana belanda dulu, daerah antara pegunungan pakis dan saluran gunungsari yang sekarang sudah menjadi perkampungan, diperuntukan tempat penampung air hujan asal dari pegunungan2 itu, sehingga masuknya air hujan kesaluran dapat diatur secara pelan2 dan sedikit demi sedikit, sedang keadaan saluran masih cukup terpelihara, cukup lebar dan cukup dalam dengan tangkisnya yang cukup kuat pula. Akan tetapi sejak jaman jepang hingga sekarang daerah penampungan air tersebut setelah diroboh menjadi perkampungan juga cukup padat rumah2nya.n sebagai akibatnya, maka sudah barang tentu semua air hujan asal dari pegunungan pakis tidak akan dapat ditampung didaerah tersebut dan secepat mungkin dialirkan masuk kesaluran oleh penduduk disana, bahkan mempercepat mengalirnya air juga menggenangi daerah perkampungan sebelah barat saluran, tidak jarang tangkisnya sebelah kanan dijebol/ diputus orang.
- c) Selain persoalan2 bagaimana diuraikan pada ayat a dan b diatas disepanjang kanan kiri saluran tersebut banyak terdapat bangunan – bangunan, w.c.2 dan jembatan2 yang sangat mengganggu / mempersempit dan merintang jalannya air, sehingga juga memudahkan meluapnya air saluran.bahkan dapat diketahui bahwa didalam saluran itu banyak terdapat bangunan2 liar dan bangunan mana didirikan diatas tanah dalam saluran yang bersala dari diratakannya tangkis didekatnya.⁵⁰

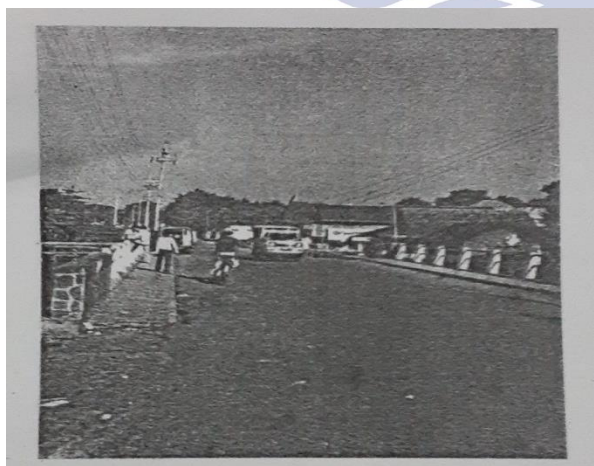
Penurunan Muka Tanah: Penggunaan Air Ledeng dan Sungai (PDAM)

⁴⁹ Arsip Kota Surabaya No.617, tahun 1966, Surat Walikota Kepala Daerah dalam masalah banjir.

⁵⁰ Arsip kota Surabaya No.617, op. cit., hlm. 5.

Penurunan muka tanah merupakan permasalahan yang umum terjadi di kota-kota besar. Besar penurunan tanah dapat diketahui melalui pengamatan yang umumnya penurunan tersebut dilakukan dengan metode hidrologis melalui pengamatan level muka air tanah serta pengamatan dengan ekstensometer dan piezometer yang diinversikan kedalam besaran penurunan tanah.⁵¹ Karakteristik penurunan muka tanah memiliki sebab yang berbeda-beda adapun yang paling mempengaruhi yakni dengan cara penggunaan air tanah (ledeng) melebihi kemampuan pengisian kembali.

Membahas terkait penggunaan air, di Surabaya rupanya sudah semenjak 1920 telah membuat pemasangan induk saluran yang kedua hal demikian dilakukan dikarenakan air ledeng yang telah bersumber diluar kota dan tersuplai makin lama semakin menipis dikarenakan kepadatan penduduk, selain itu permasalahan lainnya anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar apabila mencari saluran lain guna terpenuhinya kebutuhan air ledeng, selain itu waktu yang dibutuhkan juga memakan waktu yang lama maka dari itu kepala perusahaan air diusulkan untuk mendirikan instalasi saringan air sungai yang diresmikan pada tanggal 28 oktober 1922 instalasi ini mengalami kenaikan kapasitas produksi yang signifikan dimana pada tahun 1953 meningkat menjadi kapasitas 280L/ sec (24.000 m³/ sehari)⁵². Adapun proses yang dilakukan untuk mendapatkan penyaringan air yang baik untuk digunakan dengan cara yang terbagi 3 golongan seperti: pengendapan, penyaringan dan pembersihan, hasil akhir air tersebut dipantau lewat laboratorium kesehatan tiap 2 hari adapun hasil pemeriksaan yang ditujukan adalah baik



Gambar 12. Pembuatan jembatan beton JL. Kedurus-Lakarsantri

Sumber : Sub bagian Humas & protokol kotamadya daerah tingkat 2 Surabaya 1980.

Meskipun begitu Surabaya dapat dikatakan masih mengalami penurunan tanah, hal demikian diakibatkan karena persediaan pemasok kebutuhan air yang disediakan oleh PDAM dengan yang dibutuhkan oleh penduduk masih berada pada angka 55% dimana dengan jumlah penduduk yang berkisar +/- 1000.000 jiwa dengan kebutuhan air +/- 1000 L/ sec memiliki hasil akhir yakni kekurangan yang berkisar 45% dimana sisannya harus dicari sendiri dan yang paling gampang yakni pengeboran air tanah, selain itu pengaruh lain disebabkan karena pembangunan gedung bertingkat dan daerah Surabaya yang terdapat di dataran rendah dan dekat dengan pesisir yang mana kondisi tersebut menjadikan wilayah Surabaya sangat rentan terhadap tekanan lingkungan.⁵³

Maka dari itu terkait dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan yang terjadi pembangunan penanganan banjir yang di wujudkan pada tahun Soekotjo akibat permasalahan genangan akibat terdampnya rumah hunian derealisasikan dengan cara pemantauan assainering khususnya ditujukan untuk penghindaran genangan air dalam kota seperti memperbaiki tangkis penting yang rusak, pencegahan kerusakan tangkis yang baik, up grade jalan seperti kedurus dan lakarsantri sepanjang 9050 m² dengan pembuatan jembatan dan 32 gorong-gorong⁵⁴.

Umumnya hal tersebut ditujukan meskipun penurunan tanah tidak bisa terhindarkan setidaknya air hujan yang melebihi kapasitas yang menyebabkan rumah terendam dapat teratasi dengan pembuangan saluran air hujan ke sungai yang dialirkan ke laut, meskipun begitu upaya pemerintah dalam pengusahaan penggunaan air PDAM terus dijadikan sebagai rencana jangka Panjang, hal tersebut dibuktikan dengan, meningkatnya penggunaan air yang berasal dari PDAM pada masyarakat Surabaya pada tahun 2011 dengan prosentase yang meningkat yakni menjadi 70%.⁵⁵

Normalisasi Genangan: Pengerukan dan Pelebaran Kali

Air hujan yang melewati Surabaya pada umumnya mengalir kedalam sungai-sungai dengan membawa pasir yang dihasilkan dari daratan, tak hanya itu saja pengaruh lainnya disebabkan seperti adanya bangunan disekitar yang cukup menghambat jalannya air seperti bangunan liar yang mengikis tangkis didekatnya untuk itu maka tak heran diperlukan pengecekan dan pengerukan pasir-pasir kembali agar sungai tidak meluap dan berfungsi sesuai debit air untuk menampung saat-saat tertentu umumnya saat terjadinya musim penghujan, terkait dengan hal tersebut maka pada masa soekotjo.

⁵¹ Bambang, korelasi penurunan muka tanah dengan penurunan muka air tanah di kota Semarang (Semarang: Jurnal Teknik, vol. 34 No. 3 Tahun 2013, ISSN 0852- 1697), hlm. 1.

⁵² Sjamsu Pangestu, buku petunjuk kota besar Surabaya (Surabaya : Djawatan penerangan, 1957), hlm. 107.

⁵³ Bambang. *Op. cit.*, hlm. 1.

⁵⁴ Sub bagian humas & protokol, Surabaya dalam lintas pembangunan (Surabaya : kota madya daerah tingkat II, 1980), hlm. 126.

⁵⁵ Triono Oni, *access clean water in the community of Surabaya city and their bad impacts clean water access to Surabaya community productivity*. (Surabaya: UNAIR), hlm. 149.

Opsi pengerukan ini dilakukan disekeliling wilayah yakni daerah saluran gunungsari, bulak banteng, waduk morokrembangan, dan kalimas, terkait pengerukan tersebut langkah yang diambil dilakukan dengan mengadakan kerja bakti dengan penduduk lingkungan sekitar ditambah tenaga-tenaga dari komres, dan front nasional percabang kecamatan yang bersangkutan, pekerjaan ini diintegrasikan dengan kecamatan- kecamatan lain yang dilewati saluran kali. Berikut terdapat bukti fisik undangan yang merujuk pada partisipasi masyarakat sebagai berikut :

Undangan⁵⁶

Dengan ini kami mengharap atas kerawuhan bapak besuk pada :

Hari /tanggal : Minggu tgl. 8 mei 1966.
 Djam : 08.00 pagi
 Bertempat di : Wonokitri Gang Besar .
 Dengan acara : pembukaan kerja bakti pengerukan kali irigasi gunungsari pada hari "H" (dari Permulaan hari kerja bakti)

Dampak sosial dan ekonomi masyarakat

Permasalahan dasar umat manusia patut di tindak lanjuti dan dipenuhi agar masyarakat dapat hidup menjadi seimbang, adapun permasalahan sosial yang umumnya dipenuhi telah di singgung oleh PBB yakni melalui MGDS (tujuan pembangunan abad milenial) dimana tuntutan sasaran telah dibuat, dicapai dan dilaksanakan oleh 191 negara anggota pada tahun 2015.

Meskipun begitu normalisasi masyarakat yang terjadi pada masa Soekotjo ini dalam kesadaran lingkungan tersebut tidak semata-merta mudah diterima, masih terdapat banyak penyelewengan dan memang pada dasarnya membutuhkan waktu yang sedikit lama, adapun terkait tantangan -tantangan yang dihadapi sebagaimana sebagai berikut:

- Banyaknya bangunan yang dibangun di kedua sisi sungai secara liar, selain itu banyak pondasiannya yang tertanam di lahan bantaran sungai dan menghalangi aliran air
- Volume sampah yang tidak tertata di sejumlah wilayah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapat produksi sampah di kota Surabaya yang tercatat sekitar 4500- 5000 m3 per hari, dimana jumlah tersebut melampaui kapasitas yang hanya dapat menampung daya angkut sebanyak 1750 m3 perhari dan pihak swasta (pabrik kompos) sebanyak 400 m3.⁵⁷

Terkait dengan tantangan- tantangan tersebut harapannya pemerintah dapat mengatasinya dengan baik agar permasalahan sosial dapat teratasi dan negara bebas dari penyimpangan-penyimpangan sosial. Adapun terdapat 8 sasaran yang harus di capai dimana berorientasi pada pembangunan yang disepakati secara global meliputi:⁵⁸

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat
2. Mencapai pendidikan secara universal
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita
4. mengurangi tingkat kematian anak
5. Memperbaiki kesehatan ibu
6. Mengurangi hiv aids, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
8. Membentuk kerja sama global untuk pembangunan

Sebagaimana pada tahun raden Soekotjo ini ratifikasi program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat Surabaya dalam penanganan banjir telah dilaksanakan dan diwujudkan dengan kategori cukup baik adapun pembahasan prospek pengembangan daerah aliran kali Surabaya dalam bidang sosial dan ekonomi bertujuan untuk meletakkan prospek penanganan banjir Surabaya dengan kerangka kesepakatan " millenium developmen goal" umumnya pertanyaan yang berkaitan dengan butir" " millenium development goal" sebagai berikut:

- Dapatkah penanganan banjir membantu mengurangi tingkat kematian anak dan memperbaiki kesehatan ibu dalam menanggapi ancaman wabah seperti hiv aids, malaria dan sebagainya.
- Dapatkah prinsip pembangunan yang dijalankan lewat kebijakan dan penyusunan program penanganan banjir dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup.
- Dapatkah fasilitas air bersih dan perbaikan hidup masyarakat dalam pemukiman kumuh dapat teratasi.

Kenyataan lapangan yang berhubungan dengan pernyataan diatas diharapkan dapat menjadi contoh pengentasan kemiskinan dalam aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Dimana landasan aspek tersebut juga dipengaruhi oleh PERDA yang mengatur didalamnya sebagaimana dalam pasal 2 ayat (4) UUPA yang menjelaskan terkait penguasaan negara yang sepenuhnya diberikan kepada daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat yang berlaku di masing- masing wilayah.

Terkait dengan pasal tersebut maka terkait dengan penstabilan yang baik, maka kebijakan yang diambil oleh Walikota mengambil andil dalam penataan kota Surabaya sebagaimana dalam UU no 5 Tahun 1960 pasal 3 terkait dengan izin pemakaian tanah yang berhubungan dengan bangunan liar bagi masyarakat yang tidak memiliki izin maka akan digusur dan dihancurkan oleh pamong praja yang dijaga oleh aparat negara. Meskipun begitu sebagaimana dengan penstabilan lingkungan sebagaimana dalam teori *resiliansi* tidak semua bangunan tersebut dibongkar, sebagian wilayah yang dirasa sangat mengganggu maka

⁵⁶ Arsip kota Surabaya banjir tahun 1965, undangan kerjabakti Camat Wonokromo, Surabaya.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 154.

⁵⁸ Pitono Djoko, *Sungai sebagai pusat peradaban* (Jakarta:

Departemen kebudayaan dan pariwisata, 2008), hlm. 107.

akan dipindahkan bahkan melegalkan untuk memperbaikinya dan melaksanakan proses pengurusan dokumen legal atas tanah tersebut, sebagaimana dengan yang dijelaskan pada subbab di atas terkait tanah stren di Surabaya pada wilayah Wonokromo. Terkait dengan hal tersebut maka pengaruhnya bagi masyarakat tidak banyak yang menuntut aksi dikarenakan masyarakat tetap mendapatkan kompensasi dan negosiasi terkait permasalahan yang ada, adapun hal tersebut tentu membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit berikut disajikan gambar tabel terkait dana yang dikeluarkan.

Tahun Anggaran	Realisasi
1969/1970	Rp. 516.334.983,-
1970/1971	Rp. 639.267.004,-
1971/1972	Rp. 739.968.598,-
1972/1973	Rp. 988.667.513,-
1973/1974	Rp. 901.589.411,-

Gambar 13. Progres report Pelita 1 kotamadya Surabaya

Sumber : Sub bagian humas & protokol kotamadya , 1980

Gambar diatas merupakan bukti hasil pengeluaran anggaran pembangunan yang dilajankan di kotamadya surabaya selama periode 1 REPELITA, sebagaimana dengan kerangka millenium development goal hasil pembangunan yang dijalankan mampu menghasilkan penyelesaian proyek landasan dalam 3 bidang, adapun sebagai berikut.⁵⁹

- Bidang ekonomi (77.31%)Rp. 2.655.017.283,-
 - Bidang sosial (7.170%)Rp. 246.220.198,-
 - Bidang umum (15.52%) Rp. 532.932.534,-
- Dari hasil tersebut umumnya penanganan banjir dapat sedikit teratasi lewat proyek rehabilitasi/ pembangunan yang dijalankan adapun kebijakan yang dilakukan yakni dengan cara:

Bidang ekonomi :

- Mengupgrade jalan-jalan ekonomi dan protokol, termasuk jembatan dan jalur hijau
- Meningkatkan mutu jalur- jalur jalan termasuk jembatan .
- Rehabilitasi jalan local



Gambar 14. Jalan-jalan yang rusak akibat genangan air memacetkan lalu lintas.

Sumber: Sub bagian humas dan protokol kotamadya daerah tingkat II Surabaya, 1980

Hubungan aspek tersebut dalam bidang ekonomi diakibatkan dengan fasilitas yang dibuat semakin memadai dan mudah dijangkau masyarakat sehingga warga surabaya bebas bereksplorasi dalam meningkatkan mutu ekonomi, adapun selain terjadinya ledakan urbanisasi perubahan surabaya pada revolusi industri juga turut mampu berdampak pada dampak negatif ekonomi yakni pemukiman kumuh dimana tanpa adanya pengaruh kuat dari pendidikan, pelencengan norma yang disebabkan oleh lingkungan mampu memberikan dampak negatif bagi sekitar hal demikian ditujukan bahwa pada masa tersebut masih banyak munculnya kejahatan, pelanggaran lalu lintas, dan volume sampah.⁶⁰ kesadaran masyarakat yang minim inilah menjadikan kebijakan penanganan banjir sedikit demi sedikit direalisasikan dalam **Bidang sosial** adapun pengaruhnya sebagai berikut :

1. Pengadaan kerja bakti
2. Pelarangan pembuangan sampah di saluran air sungai
3. Penertiban bangunan tepi sungai
4. Mengadakan pemisahan yang sempurna antara air asin dengan air tawar dengan menjamin kota tetap bebas dari malaria (pemberantasan sarang nyamuk jenis anopheles sundaicus)

Hasil realisasi yang dijalankan menghasilkan perseteruan dan budaya baru bagi masyarakat kota Surabaya itu sendiri dimana karena sebab ulah dari masyarakat yang kurang dalam menjaga lingkungannya, menjadikan renungan bagi masyarakat kota Surabaya di masa depan adapun terkait dengan

⁵⁹ Sub bagian humas & protokol, *Surabaya dalam lintas pembangunan* (Surabaya: kota madya daerah tingkat II, 1980), hlm. 124.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 148.

pengaruh renungan tersebut yang paling beresiko yakni pemukiman penduduk daerah stren kali, dimana pihak pemerintah tidak segan-segan dalam melakukan penggusuran apabila dirasa air yang ditampung tidak bisa diatasi / meluber (banjir).

Adapun hal tersebut terjadi pada kawasan daerah jagir dimana terkait pengaruh social umumnya tindakan tersebut menyebabkan permiskinan dan penghancuran terhadap system pengamanan social sebagai dampak dari penggusuran paksa, atas peristiwa tersebut banyak masyarakat yang kemudian berusaha memperoleh haknya dan agar tidak terjadi hal yang sama. Umumnya mereka melakukan berbagai cara baik membuat paguyuban dalam wujud usaha untuk mempertahankan pemukiman mereka, juga membuat penataan pemukiman yang dihimbau oleh pemerintah dengan cara menghadap ke arah sungai.



Gambar 15. Dialog walikota dengan warga sebagai pemenuhan pelayanan masyarakat
Sumber : Sub bagian humas dan protokol kotamadya daerah tingkat II Surabaya, tahun 1980

Selain itu akibat pembangunan yang dirasa baru berjalan dan hanya beberapa saja yang dapat terealisasi menunjukan sejumlah bukti bahwa masih terdapat banyak geangan air yang meluber di jalan dan mengganggu aktifitas dalam bidang ekonomi, dengan adanya hal tersebut pada dasarnya dampak social dan ekonomi masih dikatakan berada diujung tanduk pada masa tersebut dimana dalam upaya penataan ulang suatu wilayah harus dilakukan dengan hati-hati, rencana yang matang dan berjalan sedikit demi sedikit dan teratur. Adapun pengaruh yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan dalam bidang social yakni dengan cara terbentuknya paguyuban dengan slogan warga surobyo jogo kali.

Lewat paguyuban warga stren kali surabaya (PWSKS) warga mulai mengorganisasikan

kampungnya baik dari memperbaiki kualitas lingkungan melalui kearifan daerahnya sendiri dan juga mengkampanyekan diri dalam media menjadikan paguyuban tersebut menjadi dampak positif bagi warga surabaya untuk sadar dan peduli pada lingkungan sekitar adapun terkait pelarangan dalam pembuangan sampah, warga mulai sepakat untuk memilah yang kemudian ditimbang dan dijual ke pengepul kampung sekitar, melalui kelompok tabungan perempuan uang tersebut dijadikan dana cadangan renovasi kampung.

Tindakan pemilahan sampah tersebut ternyata telah menjadi budaya dan diteruskan pada masa sekarang tindakan tersebut rupannya tidak hanya dilakukan pada wilayah tepi sungai saja namun juga pada beberapa kecamatan yang diwajibkan dalam penataan lingkungan tersebut, bahkan tak sedikit warga memungut sampah plastik yang mengapung di sungai, lambat laun tindakan tersebut membuka mata anggota DPRD jawatimur dimana melalui perda nomor 9 tahun 2007 terkait penataan pemukiman stren kali surabaya menghasilkan kesimpulan dimana warga diperbolehkan tetap tinggal di pemukiman terbatas di stren kali dengan melakukan penataan kampung.⁶¹

PENUTUP

Kesimpulan

Umumnya banjir adalah suatu bencana yang dapat dikatakan sangat mengganggu baik dengan estimasi waktu surut yang lama maupun gelombang air yang dibawa dengan kecepatan yang berbeda-beda, dipengaruhi dengan tinggi rendahnya permukaan tanah dimana akibat hal tersebut mampu menjadi ancaman yang cukup serius hingga kematian.

Dari berbagai data yang sudah diinterpretasi oleh penulis maka ada beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan sekaligus menjawab dari rumusan masalah penelitian. Pertama aspek penataan kota Surabaya sejatinya baru pertama kali terealisasi pada masa Soekotjo dimana hal tersebut di sebabkan dengan pengaruh Orde baru dan anggaran yang lumayan untuk pembangunannya.

Kedua, walikota pada masa Soekotjo banyak menggandeng banyak pihak dalam aspek penataan kota, utamanya dalam aspek budaya. Budaya yang dibangun inilah memiliki pengaruh besar bagi keberlanjutan penanganan walikota selanjutnya

Ketiga, terkait dengan permasalahan ekosistem lingkungan yang terganggu, pada dasarnya banyak factor yang mempengaruhi satu sama lain untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah demi kesuksesan kota agar dapat menjadi kota yang sehat dan baik .

Penstabilan masyarakat yang mulai dijalankan terkait kebijakan penanganan tersebut juga turut mempengaruhi pengurangan debit geangan air, assenering / pembuatan saluran air yang diteruskan dari periode ke periode walikota sebagai pencegah banjir dan

⁶¹ Marco, *Stren kali Surabaya contoh untuk Jakarta*.
[https://rujak.org/sunan-jogokali-gotong-royong-hijaukan-](https://rujak.org/sunan-jogokali-gotong-royong-hijaukan-kampung/)

[kampung/](#). Diakses tanggal 9 juli 2009.

dijadikan sebagai rencana jangka pendek ataupun jangka panjang mampu menghasilkan budaya yang diturunkan dan menghasilkan sejumlah sebuah prestasi kota seperti The Aga Khan Award for Architecture, 1986; UNEP Award, 1990; dan The Habitat Award, 1991 (Ernawati & Santosa, 2014). Dimana pada pelaksanaannya, keberhasilan program dapat tercapai dengan adanya peran serta dari masyarakat. menunjukkan kepada kita bahwa alam akan bekerja sesuai dengan cara kita mengolahnya, karena masing-masing memiliki porsi dan sebab akibat masing-masing atas peristiwa yang kita lakukan, maka dari itu dalam setiap aspek harus diperhatikan dengan pertimbangan dalam hal baik dan buruknya agar kondisi lingkungan dapat berjalan dan tercipta sebagaimana yang kita inginkan.

Dari beberapa simpulan yang didapat, maka penulis dapat merumuskan beberapa pernyataan yang bisa diambil dari fenomena penanganan banjir. Banyak sekali pesan moral dan nilai-nilai yang dapat diambil dalam pembahasan ini. Secara umum, penelitian ini dapat memberikan pesan moral kepada pembaca tentang bagaimana kita harus menyikapi dan memperlakukan alam, kebijakan apa yang harus kita ambil apabila kita dihadapkan pada permasalahan yang sama di masa depan, negosiasi dan komunikasi antar pihak juga tidak kalah penting karena dengan kita berkomunikasi pandangan yang sekiranya kita tidak ketahui dapat kita pahami dan kita atasi bersama, sebagaimana dialog yang dilakukan oleh walikota, pandangan tersebut penting agar tidak ada perselisihan antara masyarakat dan pemerintah karena pada dasarnya kita adalah partner yang saling membutuhkan satu sama lain, sikap saling membutuhkan inilah yang perlu dijembatani lewat komunikasi agar tidak ada miss komunikasi hingga memunculkan adanya suatu konflik.

Dari topik penelitian ini, kita juga mengetahui bahwa sepanjang pemikiran manusia sebenarnya tidak ada perubahan, yang berubah hanya kemajuan teknologi yang menyebabkan kita menyesuaikan keseimbangan lingkungan yang ada terkait dengan segala sesuatu, pemikiran pada dasarnya jalan keluarnya sama, maka dari itu lewat kita memahami sejarah penanganan yang ditarik dari wabah hingga budaya kebersihan diri dan lingkungan. Sejatinya manusia harus berubah dan bertindak baik di dunia karena apabila tidak, dampaknya akan terasa, baik cepat ataupun lambat dikemudian hari. Penanganan banjir ini adalah bukti yang bisa dijadikan pembelajaran untuk hidup agar bisa lebih menghormati alam

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip & Dokumen

- Arsip Statis III Direktorat Pengolahan. *Guide Arsip Presiden RI: Soeharto 1967-1998*. Jakarta: Direktorat Pengolahan Arsip Nasional RI. 2018.
- Arsip nasional republik Indonesia. *Masalah banjir di Batavia abad XIX*. Jakarta: Arsip nasional republik Indonesia, 2003.

- Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. *Sourabaya Kampung Belanda di Bantaran Jalur Perdagangan Kali Mas*. Surabaya: Badan Arsip & Perpustakaan Kota Surabaya. 2011.
- RPJMD kota Surabaya. *Gambaran umum kondisi daerah*. Surabaya: RPJMD kota Surabaya, 2010.
- Soekotjo. *Masalah banjir(drainage) dalam kotapradja surabaya*. Surabaya: Arsip kota Surabaya, Nomor. J.24/ 163, Agno. 7804/46.1966.
- Soekotjo. *Idzin persewaan tanah- tanah dipinggir sungai(stren)*. Surabaya: Arsip kota Surabaya, Nomor. 7804/ 939, 1965.
- Soepardi. *Mengatasi daerah banjir Darmo*. Surabaya: Arsip kota Surabaya, 1966.
- Soepardi. *Kerja bakti wonokitri*. Surabaya: Arsip kota Surabaya, 1966.
- Soekono. *Pengerukan afvoer bulak banteng*. Surabaya: Arsip kota Surabaya, 1966.

B. Surat kabar

- CSIS. *Dimensi politik ekonomi pembangunan nasional: kebijakan dan reformasi*. 1996.
- Hidayat, Anas. *Sub versi*. 2013.
- Liberty. *Keamanan pasar wonokromo*, April 01, 1966.
- Liberty. *Perkembangan kota Surabaya*, April 01, 1966.
- Liberty. *Pembongkaran bangunan*, Maret 05, 1966.
- Newsletter. *membaca kota surabaya*, Vol 7, November 2010.
- Tempo. *Johan silas soal konsep kota kampung Surabaya*. Februari 23, 2020.

C. Buku

- Basundoro, Purnawan. *Dua kota tiga zaman*. Yogyakarta: ombak. 2009.
- Basundoro, Purnawan. *Merebut Ruang Kota Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya: 1900-1960an*. Tangerang: CV Marjin Kiri. 2013.
- Basundoro, Purnawan. *Sejarah pemerintahan kota Surabaya*. Yogyakarta: Elmatera Pubhling. 2012.
- Daryono. *Surabaya dalam lintas pembangunan*. Surabaya: sub bagian humas dan protokol. 1980.
- Dick, Howard. *Surabaya City of Work a Socioeconomic History, 1900-2000*. Ohio: University Press. 2002.
- Gunawan, Restu. *Sungai sebagai pusat peradaban*. Jakarta : departemen kebudayaan dan pariwisata. 2008.
- Koesman, Samsu. *Buku petunjuk kota besar Surabaya*. Surabaya: djawatan penerbangan kota besar Surabaya. 1957.
- Stroomberg. *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2018.

D. Skripsi

- Dianingrum, Anita. *Perkembangan Program Perbaikan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat di Surabaya*. Tesis. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Kota Surabaya. 2017.

- Eko, Januar. *Program Karantina Judi: Proyek Walikota Soekotjo di Surabaya tahun 1967-1968*. Skripsi. Universitas Airlangga. Kota Surabaya. 2016.
- Nurchayanti, Denik. *Kehidupan sosial ekonomi masyarakat kota Surabaya tahun 1950- 1966*, Skripsi. Universitas negeri Surabaya. Kota Surabaya. 2014.
- Riesta, Dita. *Pembangunan ekonomi kotamadya surabaya masa pemerintahan walikota Soekotjo tahun 1966- 1974*. Skripsi. Universitas airlangga. Kota Surabaya. 2021
- Tri, Cahyono. *Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan diatas tanah pemerintah kota surabaya*. Skripsi. Universitas negeri surabaya. Kota surabaya. 2020.
- Yulia, Evi. *Kampung Improvement Programme (KIP): Perkembangan dan Perubahan di Kampung Kebalen Surabaya Tahun 1976-1986*. Skripsi. Universitas Airlangga. Kota Surabaya. 2016.

E. Jurnal ilmiah

- Basundoro, Purnawan. *Problem pemukiman pascarevolusi kemerdekaan: studi tentang pemukiman liar di kota surabaya 1945- 1960*. Jurnal humaniora, vol. 16, No. 3. 2004.
- Darmo, Bambang. *Korelasi penurunan muka tanah dengan penurunan muka air tanah di kota Semarang*. Jurnal Teknik, Vol. 34, No. 3. 2013.
- Fijriyani, Aizza. *Penyakit kolera di Surabaya 1962-1974*. Jurnal Verleden, Vol. 3, No. 1. 2014.
- Handinoto, Hartono. *Surabaya Kota Pelabuhan (Surabaya Port City)*.Jurnal Staff Pengajar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Surabaya
- Haning, Mita. *Mobilitas Penduduk Musiman di Kota Surabaya: Dampaknya Terhadap Lingkungan Permukiman Kumuh*. Jurnal Kependudukan Indonesia. 2008.
- Husein, Sarkawi B. *The Improvement of Kampong as an Instrument to Mitigate Floods in Surabaya*. Jurnal IOP Publisher. 2015.
- Husein, Sarkawi B. *Banjir, Pengendaliannya, dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya, 1950- 1976*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 18, No.1. 2016.
- Inda, Ika. *Hwa- hwee ku sayang hwa- hwee ku malang*. Avatara, vol. 01, No. 03. 2013.
- Kumalasari, Ima. *Gerakan Program Kali Bersih (Prokasih) di kali Surabaya tahun 1987-1997*. Historia, Vol. 1, No. 1. 2018.
- Lay, Cornelis. *Volunteers from the periphery (case studies of survivors of the lapindo mudflow and stren kali, surabaya, forced eviction)*. Southeast asian studies, Vol. 6, No. 1. 2017
- Mashud, Mustain. *Surabaya sebagai kota kreatif*, Surabaya: FISIP UNAIR. 2013.
- Mas'oed, Mohtar. *The indonesian economy and political structure during the early new order, 1966-1971*. Ohio: university microfilms international. 1983.
- Riman. *Evaluasi Sistem Drainase Perkotaan di Kawasan Kota Metropolis Surabaya*. Widyateknika, Vol. 19, No. 2. 2011.
- Shuji, Johan., dkk. *Typology of Kampung Houses and Their Transformation Processa Study on Urba Tissues of an Indonesian City*. Journal of Asian Architecture and Building Engineering. 2002.
- Silas, Johan. *Government-Sommunity Partnership in Kampung Improvement Programmesin Surabaya*. Environment and Urbanization, Vol. 4, No. 2. 1992.
- Soenyono. *Perkembangan permukiman di bantaran sungai Surabaya dari prespektif sosiologi*. Jurnal penelitian humaniora, Vol. 11, No. 2. 2006.
- Susetyo, Cahyono. *Urban Flood Management in Surabaya City: Anticipating Changes in The Brantas River System*. journal International Institute for Geo Information Science and Earth Observationenschede. 2008.
- Tantri, Erlita. *(Politic) Dutch flood Control in Surabaya 1906- 1942*. Putrawidya, Vol. 18, No. 2, 155-172. 2017.
- Triono, Oni. *Access clean water in the community of Surabaya city and their bad impacts clean water access to Surabaya community productivity*. Jurnal JIET, Vol. 3, No.2. 2018.
- Wahyono, Dwi. *Propaganda orde baru 1966- 1980*. Verleden, Vol. 01, No. 01. 2012.
- Wahyu, Totok. *Penertiban versus penggusuran: strategi komunikasi dan partisipasi pembangunan (Studi kasus di stren kali jagir wonokromo- Surabaya)*. Jurnal ilmiah Scriptura, Vol. 3, No. 2. 2009.
- Widianto, Hendra. *Strategi bertahan masyarakat stren kali jagir wonokromo surabaya dari penggusuran*. Jurnal kajian moral dan kewarganegaraan, Vol. 05, No. 03. 2017.
- Yuni, Galuh. *Pemukiman liar di Surabaya tahun 1970- 2000*. Publika budaya, Vol. 2, No. 1. 2014.
- Yuni, Galuh. *Pemukiman liar di surabaya tahun 1970-2000*. Publika budaya, Vol. 2, No. 1. 2014.
- Yuni, Sri. *Sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam banjir*. Jurnal PKS, Vol. 15, No.2. 2016

F. Internet

- Ayorek. *Dinoyo dari mata Robbie Peters: ulasan Surabaya, 1945-2010*, (Online), diakses dari <http://ayorek.org/playground/2014/05/dinoyo-robbie-peters-surabaya-1945-2010/>. Pada Mei 17, 2014.
- Bbc indonesia. 2050, *Jakarta utara tenggelam: semua yang perlu anda ketahui*. (Online), diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/resources/idx-3928e4ca-f33b-4657-aa35-98eb5987f74e>. Pada

Agustus 13, 2018.

LHKI Surabaya. *Sejarah Pemukiman dan Kronologi Penggusuran Kawasan Jagir Surabaya*, (Online), diakses dari <http://lhkisby.blogspot.com/2009/05/sejarah-pemukiman-dan-kronologi.html?m=1>. Mei 20, 2009.

Rujak. Stren kali, Surabaya: contoh untuk jakarta, (Online), diakses dari <https://rujak.org/sunan-jogokali-gotong-royong-hijaukan-kampung/>. Pada Juli 09, 2009.

Radar Mojokerto. *Irrigate afdeling Brantas, sang pengendali banjir kota pahlawan*, (Online), diakses dari <https://radarmojokerto.jawapos.com/nasional/18/10/2017/irrigatie-afdeling-brantas-sang-pengendali-banjir-kota-pahlawan/>. Pada Oktober 18, 2017.

The Glocal Experience Team. *Dutch Colonialism Fatal for Jakarta?*, (Online), diakses dari <https://theglocalexperience.com/2020/07/14/dutch-colonialism-fatal-for-jakarta/amp/>. Pada Juli 14, 18:04, 2020.

